BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2024
LAPORAN KEUANGAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, menyajikan Laporan Keuangan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2024.

Laporan Keuangan ini merupakan laporan keuangan kompilasi antara SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim dan UPTD Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu: 1. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Api-Api, 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan diperkuat lagi dengan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan tahun 2024 ini merupakan laporan tahunan dari penerapan sistem berbasis akrual yang dimulakan pada tahun 2015.

Demikian laporan keuangan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna, Oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*). Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*), serta tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Samarinda, 22 Januari 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T., M.T.

NIP. 197[illegible]16 200604 1 006

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vi**
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ..... **vii**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ..... **viii**
LAPORAN OPERASIONAL **1**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS **2**
NERACA **3**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **4**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Maksud dan Tujuan 2
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Sistematika Penulisan 4

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD **6**
2.1. Ekonomi Makro 6
2.2. Kebijakan Keuangan 14
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja 15

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN **25**
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 25
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target 50

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 52
4.1 Entitas Akuntansi 52
4.2 Basis Akuntansi 52
4.3 Basis Pengukuran 52
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi 53
4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi 54
4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan 54
4.4.2.1 Pendapatan – LRA 60
4.4.2.2 Belanja 64
4.4.2.3 Pendapatan - LO 69
4.4.2.4 Beban 70
4.4.2.5 Aset 72
4.4.2.6 Kewajiban 79
4.4.2.7 Ekuitas 79

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN **60**
5.1 Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan keuangan SKPD 60
5.1.1. Pendapatan 60
5.1.1.1. Retribusi 61
5.1.1.2. Lain-lain PAD yang sah 63
5.1.2. Belanja 64

5.1.2.1 Belanja Operasi 65
5.1.2.2 Belanja Modal 67
5.1.2.3 Jaminan Pemeliharaan 68
5.1.3. Pendapatan LO 68
5.1.3.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO 69
5.1.3.2. Lain-lain PAD Yang Sah – LO 70
5.1.4. Beban LO 70
5.1.4.1. Beban Operasi 71
5.1.4.1.1. Beban Pegawai 71
5.1.4.1.2. Beban Persediaan 71
5.1.4.1.3. Beban Jasa 71
5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan 71
5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas 71
5.1.4.1.6. Beban Diserahkan kepada Masyarakat 72
5.1.4.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 72
5.1.5. Aset 72
5.1.5.1. Aset Lancar 73
5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan 73
5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran 73
5.1.5.1.3. Piutang 74
5.1.5.1.4. Persediaan 74
5.1.5.2. Aset Non lancar 74
5.1.5.2.1. Aset Tetap 74
5.1.5.2.1.1. Tanah 75
5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin 75
5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan 76
5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 77
5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya 77
5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 77
5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan 77
5.1.5.2.2. Aset Lainnya 77
5.1.5.2.2.1. Aset Tidak Berwujud 78
5.1.5.2.2.2. Aset Lain-Lain 78
5.1.6. Kewajiban 78
5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek 79
5.1.6.2. Pendapatan Diterima Dimuka 79
5.1.6.3. Utang Beban 79
5.1.7. Ekuitas 79

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 81
6.1 Domisili dan Struktur Organisasi 81
6.2 Tugas dan Fungsi 82
6.3 Sumber Daya Manusia 85

BAB VII PENUTUP 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Pergeseran Tahun 2024 7
Tabel 2 Target Kinerja dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2024 15
Tabel 3 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 60
Tabel 4 Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2024 dan 2023 62
Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 dan 2023 65
Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023 65
Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023 66
Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 67
Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023 67
Tabel 10 Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023 69
Tabel 11 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2024 dan 2023 69
Tabel 12 Realisasi Beban LO Tahun 2024 dan 2023 70
Tabel 13 Perbandingan Aset Tahun 2024 dan 2023 73
Tabel 14 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2024 75
Tabel 15 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2024 86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2024
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2024 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2024
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2024
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2024
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2024
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud
Lampiran IX	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2024
Lampiran X	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 Desember 2024 dengan tanggal cetak diatas 31 Desember 2024
Lampiran XI	Berita Acara Penutupan Kas akhir tahun 2024
Lampiran XII	Register Penutupan Kas akhir tahun 2024
Lampiran XIII	Rekap Utang Tahun 2024
Lampiran XIV	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2024 yang jadi Persediaan
Lampiran XV	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 Desember 2024
Lampiran XVI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 Desember 2024 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XVII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 Desember 2024 sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XVIII	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
Lampiran XIX	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
Lampiran XX	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Tahun 2024
Lampiran XXI	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 Desember 2024 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXII	Kertas Kerja Rekon Aset Tetap
Lampiran XXIII	Analisa Perhitungan Vertikal dan Horisontal
Lampiran XXIV	Kertas Kerja Perhitungan ATB
Lampiran XXV	Daftar Rekap Jaminan Pemeliharaan Tahun 2024

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121
Telp. (0541) 743921 Fax. 736228
Website : peternakan.kaltimprov.go.id
e-mail : disnak@kaltimprov.go.id / disnak_kaltim@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari : (**a**) Laporan Realisasi Anggaran; (**b**) Laporan Operasional; **(c)** Laporan Perubahan Ekuitas; **(d)** Neraca; **(e)** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian interrn yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 21 Januari 2025

Pengguna Anggaran,

Fahmi Himawan, S.T., M.T.
NIP. 19741216 200604 1 006

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (L R A)

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**385.790.000,00**	**1.016.500.000,00**	**263,49**	**472.945.500,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	385.790.000,00	1.016.500.000,00	263,49	472.945.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**385.790.000,00**	**1.016.500.000,00**	**263,49**	**472.945.500,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**385.790.000,00**	**1.016.500.000,00**	**263,49**	**472.945.500,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**98.194.276.216,00**	**91.354.699.611,04**	**93,03**	**64.596.999.022,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**87.621.196.976,00**	**80.875.802.733,45**	**92,30**	**59.653.272.615,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	26.126.784.165,00	22.711.515.316,00	86,93	16.425.622.319,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.494.412.811,00	58.164.287.417,45	94,58	43.227.650.296,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**87.621.196.976,00**	**80.875.802.733,45**	**92,30**	**59.653.272.615,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**10.573.079.240,00**	**10.478.896.877,59**	**99,11**	**4.943.726.407,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.083.422.796,00	3.010.765.399,00	97,64	3.961.983.585,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.233.162.744,00	7.213.442.478,59	99,73	981.742.822,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	256.493.700,00	254.689.000,00	99,30	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**10.573.079.240,00**	**10.478.896.877,59**	**99,11**	**4.943.726.407,00**
	JUMLAH BELANJA	**98.194.276.216,00**	**91.354.699.611,04**	**93,03**	**64.596.999.022,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(97.808.486.216,00)**	**(90.338.199.611,04)**	**92,36**	**(64.124.053.522,00)**

Provinsi Kalimantan Timur, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 19720106 200604 1006

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**385.790.000,00**	**1.016.500.000,00**	**263,49**	**472.945.500,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	385.790.000,00	1.016.500.000,00	263,49	472.945.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	385.790.000,00	1.016.500.000,00	263,49	472.945.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	339.178.500,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	333.178.500,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	10.870.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	10.870.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	122.897.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	0,00	0,00	0,00	122.897.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	6.800.000,00	16.451.000,00	241,93	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	6.800.000,00	16.451.000,00	241,93	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	95.100.000,00	180.637.000,00	189,94	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	95.100.000,00	180.637.000,00	189,94	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	277.890.000,00	805.812.000,00	289,98	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	277.890.000,00	805.812.000,00	289,98	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**385.790.000,00**	**1.016.500.000,00**	**263,49**	**472.945.500,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**385.790.000,00**	**1.016.500.000,00**	**263,49**	**472.945.500,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**98.194.276.216,00**	**91.354.699.611,04**	**93,03**	**64.596.999.022,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**87.621.196.976,00**	**80.875.802.733,45**	**92,30**	**59.653.272.615,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	26.126.784.165,00	22.711.515.316,00	86,93	16.425.622.319,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.584.148.136,00	7.682.184.316,00	89,49	6.177.517.819,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.936.298.410,00	5.542.583.097,00	93,37	4.333.855.766,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.424.076.398,00	4.215.625.217,00	95,29	4.016.705.966,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.512.222.012,00	1.326.957.880,00	87,75	317.149.800,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	653.004.842,00	545.645.474,00	83,56	444.853.760,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	463.933.442,00	439.233.792,00	94,68	421.965.218,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	189.071.400,00	106.411.682,00	56,28	22.888.542,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	300.920.004,00	280.480.000,00	93,21	291.600.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	300.920.004,00	280.480.000,00	93,21	291.600.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.863.004,00	109.620.000,00	98,88	101.970.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	110.863.004,00	109.620.000,00	98,88	101.970.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	342.461.000,00	317.039.800,00	92,58	129.275.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	115.661.000,00	102.130.000,00	88,30	109.715.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	226.800.000,00	214.909.800,00	94,76	19.560.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	361.677.218,00	308.943.720,00	85,42	266.578.020,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	258.768.006,00	237.465.180,00	91,77	249.704.160,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	102.909.212,00	71.478.540,00	69,46	16.873.860,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	57.848.000,00	53.164.655,00	91,90	13.874.475,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	48.608.000,00	47.871.543,00	98,48	13.874.475,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	9.240.000,00	5.293.112,00	57,28	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	246.426,00	84.341,00	34,23	55.279,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	117.078,00	55.344,00	47,27	51.537,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	129.348,00	28.997,00	22,42	3.742,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	758.862.660,00	479.963.540,00	63,25	559.735.679,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	598.242.012,00	422.793.309,00	70,67	545.351.746,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	160.620.648,00	57.170.231,00	35,59	14.383.933,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	18.091.296,00	11.164.923,00	61,71	8.929.960,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.847.300,00	8.503.534,00	71,78	8.212.120,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.243.996,00	2.661.389,00	42,62	717.840,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	43.875.276,00	33.494.766,00	76,34	26.789.880,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	35.141.892,00	25.510.602,00	72,59	24.636.360,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.733.384,00	7.984.164,00	91,42	2.153.520,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	16.566.796.029,00	14.095.851.000,00	85,08	9.401.565.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.583.051.029,00	13.451.046.000,00	86,32	8.898.465.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14.413.051.029,00	12.376.425.000,00	85,87	8.810.215.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.170.000.000,00	1.074.621.000,00	91,85	88.250.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	983.745.000,00	644.805.000,00	65,55	503.100.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	707.445.000,00	463.050.000,00	65,45	467.820.000,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	276.300.000,00	181.755.000,00	65,78	35.280.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	975.840.000,00	933.480.000,00	95,66	846.539.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	938.520.000,00	896.160.000,00	95,49	846.539.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	873.000.000,00	834.720.000,00	95,62	810.839.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	57.120.000,00	53.040.000,00	92,86	35.700.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	37.320.000,00	37.320.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	37.320.000,00	37.320.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.494.412.811,00	58.164.287.417,45	94,58	43.227.650.296,00
5.1.02.01	Belanja Barang	37.116.527.485,00	35.573.419.664,00	95,84	19.422.109.051,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.110.885.285,00	35.567.819.664,00	95,84	19.399.294.051,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	23.520.680,00	23.170.000,00	98,51	23.776.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.156.518.509,00	1.136.366.010,00	98,26	728.637.850,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	352.859.100,00	331.076.852,00	93,83	324.855.490,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	173,00	0,00	0,00	555.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	313.186.480,00	278.146.080,00	88,81	88.360.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	13.639.200,00	13.540.000,00	99,27	11.927.100,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	1.720.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.160.500,00	15.000.000,00	98,94	38.457.610,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.330.800,00	5.323.800,00	99,87	54.015.150,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	36.137.190,00	33.208.534,00	91,90	114.419.264,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.915.600,00	1.870.600,00	97,65	1.396.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	36.459.306,00	36.083.000,00	98,97	40.785.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	236.362.209,00	229.633.005,00	97,15	545.114.090,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	102.552.300,00	102.452.350,00	99,90	1.981.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	464.724.115,00	447.960.966,00	96,39	308.230.908,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	49.150.000,00	47.900.000,00	97,46	24.520.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.572.650,00	32.767.624,00	87,21	39.133.450,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	52.434.886,00	51.548.000,00	98,31	14.498.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	74.512.404,00	59.102.950,00	79,32	70.246.900,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	196.466.332,00	194.150.200,00	98,82	37.452.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	108.199.000,00	105.232.034,00	97,26	28.633.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	690.277.423,00	652.988.479,00	94,60	318.085.596,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.738.600,00	4.205.000,00	88,74	145.540.654,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	383.980.492,00	306.896.622,00	79,93	797.190.583,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.011.275.891,00	27.075.801.215,00	96,66	12.570.898.269,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.494.397.765,00	1.369.650.870,00	91,65	1.209.008.866,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	315.928.180,00	266.517.300,00	84,36	96.396.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	0,00	84.150.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	548.500.000,00	527.080.000,00	96,09	349.085.000,00
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	17.077.500,00	17.065.823,00	99,93	38.951.911,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	3.906.000,00	3.906.000,00	100,00	2.511.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.054.061.000,00	1.907.874.200,00	92,88	1.002.174.860,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	65.642.000,00	54.633.000,00	83,23	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	23.325.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	203.316.000,00	197.522.150,00	97,15	48.960.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.847.000,00	19.847.000,00	100,00	19.600.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	144.700.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.536.000,00	17.600.000,00	90,09	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.642.200,00	5.600.000,00	99,25	22.815.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	5.628.000,00	5.600.000,00	99,50	22.815.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	14.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.186.655.502,00	11.432.967.360,45	86,70	10.236.973.881,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.600.936.436,00	10.179.984.167,00	87,75	8.943.795.431,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	725.350.000,00	491.588.000,00	67,77	300.581.600,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	926.530.000,00	546.900.000,00	59,03	753.550.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	34.200.000,00	33.966.500,00	99,32	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	66.800.000,00	64.550.000,00	96,63	108.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	105.009.000,00	105.009.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	382.010.800,00	376.793.800,00	98,63	104.292.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	154.000.000,00	61.630.000,00	40,02	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.005.850.000,00	4.491.718.000,00	89,73	5.539.198.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	820.670.900,00	757.619.650,00	92,32	345.156.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	880.267.200,00	839.400.000,00	95,36	764.340.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.182.487.200,00	1.176.590.400,00	99,50	0,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	22.500.000,00	21.907.198,00	97,37	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	1.731.600,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	239.316.000,00	237.074.250,00	99,06	166.100.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	42.491.300,00	38.759.200,00	91,22	15.319.700,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	26.640.000,00	26.370.000,00	98,99	9.675.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	64.979.250,00	64.869.900,00	99,83	44.772.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.795.000,00	2.144.909,00	56,52	12.553.830,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	49.816.500,00	36.870.822,00	74,01	25.220.733,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	487.927.686,00	479.423.492,00	98,26	453.000.651,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	37.130.400,00	36.721.000,00	98,90	31.294.400,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	176.503.200,00	159.002.596,00	90,08	157.832.671,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	58.404.500,00	42.411.200,00	72,62	35.875.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	63.257.500,00	43.664.250,00	69,03	43.302.246,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	461.597.766,00	414.371.778,00	89,77	482.949.280,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	180.312.000,00	161.864.000,00	89,77	187.582.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.817.766,00	9.711.778,00	89,78	295.367.280,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	13.523.400,00	12.139.800,00	89,77	0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	166.788.600,00	149.724.200,00	89,77	0,00
5.1.02.02.02.0011	Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	90.156.000,00	80.932.000,00	89,77	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	458.800.000,00	294.977.700,00	64,29	118.654.000,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	0,00	0,00	0,00	74.703.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	10.100.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	450.000.000,00	286.177.700,00	63,60	15.850.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	2.997.000,00
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.544.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	213.463.170,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	200.463.170,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.07.0042	Belanja Sewa Ternak Potong	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	66.000.000,00	63.408.750,00	96,07	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	66.000.000,00	63.408.750,00	96,07	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	999.000,00	0,00	0,00	255.688.500,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	53.502.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	197.524.500,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	999.000,00	0,00	0,00	4.662.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	524.057.900,00	424.537.753,45	81,01	202.423.500,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	235.257.900,00	232.347.753,45	98,76	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	146.000.000,00	67.900.000,00	46,51	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	142.800.000,00	124.290.000,00	87,04	202.423.500,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	64.264.400,00	45.687.212,00	71,09	0,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	50.000.000,00	32.006.634,00	64,01	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	3.885.000,00	3.492.086,00	89,89	0,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	10.379.400,00	10.188.492,00	98,16	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.231.268.498,00	1.214.240.220,00	98,62	1.698.743.203,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	497.318.400,00	484.911.420,00	97,51	540.057.620,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.016.000,00	31.854.200,00	99,49	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	204.969.000,00	202.046.820,00	98,57	275.305.480,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	22.266.000,00	22.254.800,00	99,95	36.634.200,00
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	31.086.000,00
5.1.02.03.02.0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	12.200.000,00	11.100.000,00	90,98	0,00
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	18.621.900,00	18.448.000,00	99,07	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	33.305.500,00	32.830.600,00	98,57	33.229.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	62.830.000,00	62.649.250,00	99,71	58.350.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	11.440.000,00	8.660.000,00	75,70	19.430.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	68.620.000,00	66.629.750,00	97,10	80.927.940,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	31.050.000,00	28.438.000,00	91,59	3.100.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	267.770.098,00	266.257.300,00	99,44	890.787.083,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	60.626.178,00	60.148.000,00	99,21	190.741.422,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	207.143.920,00	206.109.300,00	99,50	700.045.661,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	466.180.000,00	463.071.500,00	99,33	267.898.500,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	466.180.000,00	463.071.500,00	99,33	267.898.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.871.461.326,00	9.855.160.173,00	99,83	11.522.669.862,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.871.461.326,00	9.855.160.173,00	99,83	11.522.669.862,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.831.861.326,00	9.819.625.173,00	99,88	11.522.669.862,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.600.000,00	35.535.000,00	89,73	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.500.000,00	88.500.000,00	100,00	347.154.299,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.500.000,00	88.500.000,00	100,00	89.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	88.500.000,00	88.500.000,00	100,00	89.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	258.154.299,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	258.154.299,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**87.621.196.976,00**	**80.875.802.733,45**	**92,30**	**59.653.272.615,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**10.573.079.240,00**	**10.478.896.877,59**	**99,11**	**4.943.726.407,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.083.422.796,00	3.010.765.399,00	97,64	3.961.983.585,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	808.673.300,00	800.476.100,00	98,99	4.345.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	799.201.300,00	791.026.100,00	98,98	0,00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	49.201.300,00	48.526.100,00	98,63	0,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	750.000.000,00	742.500.000,00	99,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	9.472.000,00	9.450.000,00	99,77	4.345.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	9.472.000,00	9.450.000,00	99,77	4.345.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	639.290.000,00	632.963.402,00	99,01	1.224.342.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	639.290.000,00	632.963.402,00	99,01	1.224.342.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	1.224.342.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	492.610.000,00	492.600.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	146.680.000,00	140.363.402,00	95,69	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	49.797.025,00	45.800.000,00	91,97	6.283.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	49.797.025,00	45.800.000,00	91,97	1.833.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	38.915.000,00	37.500.000,00	96,36	0,00
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	1.833.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	10.882.025,00	8.300.000,00	76,27	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	148.364.643,00	146.644.750,00	98,84	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	148.364.643,00	146.644.750,00	98,84	0,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	15.824.310,00	15.800.000,00	99,85	0,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	3.631.583,00	3.500.000,00	96,38	0,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	7.058.400,00	7.050.000,00	99,88	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	121.850.350,00	120.294.750,00	98,72	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	398.500.959,00	385.718.500,00	96,79	373.863.085,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	79.702.870,00	78.945.000,00	99,05	172.187.185,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	58.800.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26.177.900,00	26.140.000,00	99,86	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	53.524.970,00	52.805.000,00	98,65	113.387.185,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	318.798.089,00	306.773.500,00	96,23	192.683.900,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	37.203.400,00	34.625.000,00	93,07	114.425.400,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	22.295.417,00	21.580.000,00	96,79	21.215.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	66.908.308,00	59.238.500,00	88,54	43.893.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	11.474.000,00	11.400.000,00	99,36	4.050.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.916.964,00	179.930.000,00	99,45	9.100.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	8.992.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	7.432.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	119.783.200,00	114.435.000,00	95,54	165.899.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	82.340.000,00	79.985.000,00	97,14	160.559.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.213.000,00	14.190.000,00	93,28	6.750.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	58.809.000,00	57.695.000,00	98,11	64.999.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	8.318.000,00	8.100.000,00	97,38	88.810.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	31.807.000,00	29.100.000,00	91,49	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	11.855.000,00	9.900.000,00	83,51	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	19.952.000,00	19.200.000,00	96,23	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	5.636.200,00	5.350.000,00	94,92	5.340.000,00
5.2.02.06.03.0045	Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	5.636.200,00	5.350.000,00	94,92	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	161.158.887,00	151.040.900,00	93,72	28.800.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	161.158.887,00	151.040.900,00	93,72	28.800.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	96.412.990,00	91.583.000,00	94,99	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	64.745.897,00	59.457.900,00	91,83	28.800.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	114.053.512,00	107.700.000,00	94,43	1.489.810.500,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	114.053.512,00	107.700.000,00	94,43	1.453.536.500,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	89.014.912,00	84.700.000,00	95,15	1.253.836.500,00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	25.038.600,00	23.000.000,00	91,86	171.900.000,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00
5.2.02.08.01.0033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	36.274.000,00
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	0,00	0,00	0,00	36.274.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	643.801.270,00	625.986.747,00	97,23	668.641.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	424.536.700,00	420.215.750,00	98,98	522.241.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	47.400.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	406.672.300,00	402.815.750,00	99,05	474.841.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	17.864.400,00	17.400.000,00	97,40	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	219.264.570,00	205.770.997,00	93,85	146.400.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	3.056.000,00	2.766.400,00	90,52	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	208.307.070,00	196.004.599,00	94,09	146.400.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.901.500,00	6.999.998,00	88,59	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.233.162.744,00	7.213.442.478,59	99,73	981.742.822,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.233.162.744,00	7.213.442.478,59	99,73	981.742.822,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.233.162.744,00	7.213.442.478,59	99,73	981.742.822,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.563.083.744,00	1.551.368.323,00	99,25	834.437.890,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	61.975.130,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	13.259.722,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	5.657.013.400,00	5.649.074.155,59	99,86	72.070.080,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	13.065.600,00	13.000.000,00	99,50	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	256.493.700,00	254.689.000,00	99,30	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	256.493.700,00	254.689.000,00	99,30	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	256.493.700,00	254.689.000,00	99,30	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	156.500.000,00	154.845.000,00	98,94	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	99.993.700,00	99.844.000,00	99,85	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**10.573.079.240,00**	**10.478.896.877,59**	**99,11**	**4.943.726.407,00**
	JUMLAH BELANJA	**98.194.276.216,00**	**91.354.699.611,04**	**93,03**	**64.596.999.022,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(97.808.486.216,00)**	**(90.338.199.611,04)**	**92,36**	**(64.124.053.522,00)**

Provinsi Kepulauan Riau, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fatoni Himawan, S.T., M.T
NIP. 19721216 006041006

LAPORAN OPERASIONAL
(L O)

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**1.016.500.000,00**	**472.945.500,00**	**543.554.500,00**	**114,93**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**1.016.500.000,00**	**472.945.500,00**	**543.554.500,00**	**114,93**
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	1.016.500.000,00	472.945.500,00	543.554.500,00	114,93
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**1.016.500.000,00**	**472.945.500,00**	**543.554.500,00**	**114,93**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.016.500.000,00**	**472.945.500,00**	**543.554.500,00**	**114,93**
8	**BEBAN**	**80.082.740.847,12**	**62.074.315.523,00**	**18.008.425.324,12**	**29,01**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**80.054.932.605,45**	**59.746.624.768,00**	**20.308.307.837,45**	**33,99**
8.1.01	Beban Pegawai	22.711.515.316,00	16.425.622.319,00	6.285.892.997,00	38,27
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	57.343.417.289,45	43.321.002.449,00	14.022.414.840,45	32,37
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**80.054.932.605,45**	**59.746.624.768,00**	**20.308.307.837,45**	**33,99**
8.1.08	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**27.808.241,67**	**2.327.690.755,00**	**(2.299.882.513,33)**	**(98,81)**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.601.036.657,00	(1.601.036.657,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	631.211.413,00	(631.211.413,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	11.756.865,00	(11.756.865,00)	(100,00)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	73.118.620,00	(73.118.620,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	27.808.241,67	10.567.200,00	17.241.041,67	163,16
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**27.808.241,67**	**2.327.690.755,00**	**(2.299.882.513,33)**	**(98,81)**
	JUMLAH BEBAN	**80.082.740.847,12**	**62.074.315.523,00**	**18.008.425.324,12**	**29,01**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(79.066.240.847,12)**	**(61.601.370.023,00)**	**(17.464.870.824,12)**	**28,35**

Provinsi Kalimantan Timur, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahrin Himawan, S.T., M.T
NIP.197412162006041006

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**1.016.500.000,00**	**472.945.500,00**	**543.554.500,00**	**114,93**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**1.016.500.000,00**	**472.945.500,00**	**543.554.500,00**	**114,93**
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	1.016.500.000,00	472.945.500,00	543.554.500,00	114,93
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.016.500.000,00	472.945.500,00	543.554.500,00	114,93
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	339.178.500,00	(339.178.500,00)	(100,00)
7.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	0,00	333.178.500,00	(333.178.500,00)	(100,00)
7.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00
7.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00	10.870.000,00	(10.870.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00	10.870.000,00	(10.870.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	0,00	122.897.000,00	(122.897.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	0,00	122.897.000,00	(122.897.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
7.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
7.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	16.451.000,00	0,00	16.451.000,00	100,00
7.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	16.451.000,00	0,00	16.451.000,00	100,00
7.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	180.637.000,00	0,00	180.637.000,00	100,00
7.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	180.637.000,00	0,00	180.637.000,00	100,00
7.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	805.812.000,00	0,00	805.812.000,00	100,00
7.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	805.812.000,00	0,00	805.812.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**1.016.500.000,00**	**472.945.500,00**	**543.554.500,00**	**114,93**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.016.500.000,00**	**472.945.500,00**	**543.554.500,00**	**114,93**
8	**BEBAN**	**80.082.740.847,12**	**62.074.315.523,00**	**18.008.425.324,12**	**29,01**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**80.054.932.605,45**	**59.746.624.768,00**	**20.308.307.837,45**	**33,99**
8.1.01	Beban Pegawai	22.711.515.316,00	16.425.622.319,00	6.285.892.997,00	38,27
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.682.184.316,00	6.177.517.819,00	1.504.666.497,00	24,36
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	5.542.583.097,00	4.333.855.766,00	1.208.727.331,00	27,89
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	4.215.625.217,00	4.016.705.966,00	198.919.251,00	4,95
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	1.326.957.880,00	317.149.800,00	1.009.808.080,00	318,40
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	545.645.474,00	444.853.760,00	100.791.714,00	22,66
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	439.233.792,00	421.965.218,00	17.268.574,00	4,09
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	106.411.682,00	22.888.542,00	83.523.140,00	364,91
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	280.480.000,00	291.600.000,00	(11.120.000,00)	(3,81)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	280.480.000,00	291.600.000,00	(11.120.000,00)	(3,81)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	109.620.000,00	101.970.000,00	7.650.000,00	7,50
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	109.620.000,00	101.970.000,00	7.650.000,00	7,50
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	317.039.800,00	129.275.000,00	187.764.800,00	145,24
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.130.000,00	109.715.000,00	(7.585.000,00)	(6,91)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	214.909.800,00	19.560.000,00	195.349.800,00	998,72
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	308.943.720,00	266.578.020,00	42.365.700,00	15,89
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	237.465.180,00	249.704.160,00	(12.238.980,00)	(4,90)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	71.478.540,00	16.873.860,00	54.604.680,00	323,61
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	53.164.655,00	13.874.475,00	39.290.180,00	283,18
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	47.871.543,00	13.874.475,00	33.997.068,00	245,03

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.293.112,00	0,00	5.293.112,00	100,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	84.341,00	55.279,00	29.062,00	52,57
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	55.344,00	51.537,00	3.807,00	7,39
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	28.997,00	3.742,00	25.255,00	674,91
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	479.963.540,00	559.735.679,00	(79.772.139,00)	(14,25)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	422.793.309,00	545.351.746,00	(122.558.437,00)	(22,47)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	57.170.231,00	14.383.933,00	42.786.298,00	297,46
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.164.923,00	8.929.960,00	2.234.963,00	25,03
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.503.534,00	8.212.120,00	291.414,00	3,55
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.661.389,00	717.840,00	1.943.549,00	270,75
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	33.494.766,00	26.789.880,00	6.704.886,00	25,03
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	25.510.602,00	24.636.360,00	874.242,00	3,55
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.984.164,00	2.153.520,00	5.830.644,00	270,75
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	14.095.851.000,00	9.401.565.000,00	4.694.286.000,00	49,93
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.451.046.000,00	8.898.465.000,00	4.552.581.000,00	51,16
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12.376.425.000,00	8.810.215.000,00	3.566.210.000,00	40,48
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.074.621.000,00	88.250.000,00	986.371.000,00	1.117,70
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	644.805.000,00	503.100.000,00	141.705.000,00	28,17
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	463.050.000,00	467.820.000,00	(4.770.000,00)	(1,02)
8.1.01.02.05.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	181.755.000,00	35.280.000,00	146.475.000,00	415,18
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	933.480.000,00	846.539.500,00	86.940.500,00	10,27
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	896.160.000,00	846.539.500,00	49.620.500,00	5,86
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	834.720.000,00	810.839.500,00	23.880.500,00	2,95
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	53.040.000,00	35.700.000,00	17.340.000,00	48,57
8.1.01.03.07.0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	37.320.000,00	0,00	37.320.000,00	100,00
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	37.320.000,00	0,00	37.320.000,00	100,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	57.343.417.289,45	43.321.002.449,00	14.022.414.840,45	32,37
8.1.02.01	Beban Barang	34.752.168.784,00	19.516.976.290,00	15.235.192.494,00	78,06
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	34.746.568.784,00	19.494.161.290,00	15.252.407.494,00	78,24
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	23.170.000,00	23.776.000,00	(606.000,00)	(2,55)
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.136.366.010,00	737.972.950,00	398.393.060,00	53,98
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	331.076.852,00	324.855.490,00	6.221.362,00	1,92
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	555.500,00	(555.500,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	278.146.080,00	88.360.000,00	189.786.080,00	214,79
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	13.540.000,00	11.927.100,00	1.612.900,00	13,52
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	(838.292.500,00)	76.872.500,00	(915.165.000,00)	(1.190,50)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	15.000.000,00	38.457.610,00	(23.457.610,00)	(61,00)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.323.800,00	54.015.150,00	(48.691.350,00)	(90,14)
8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	33.208.534,00	114.419.264,00	(81.210.730,00)	(70,98)
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.870.600,00	11.168.200,00	(9.297.600,00)	(83,25)
8.1.02.01.01.0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	36.083.000,00	40.785.700,00	(4.702.700,00)	(11,53)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	224.520.905,00	578.306.325,00	(353.785.420,00)	(61,18)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	99.142.350,00	2.786.300,00	96.356.050,00	3.458,21
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	447.640.966,00	314.133.408,00	133.507.558,00	42,50
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	47.250.000,00	24.520.000,00	22.730.000,00	92,70
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.767.624,00	39.133.450,00	(6.365.826,00)	(16,27)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	51.548.000,00	14.498.400,00	37.049.600,00	255,54
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	55.779.500,00	71.203.350,00	(15.423.850,00)	(21,66)
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	194.150.200,00	37.452.600,00	156.697.600,00	418,39
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	105.232.034,00	28.633.000,00	76.599.034,00	267,52

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	672.862.229,00	309.388.648,00	363.473.581,00	117,48
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	4.205.000,00	145.540.654,00	(141.335.654,00)	(97,11)
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	271.946.622,00	782.935.705,00	(510.989.083,00)	(65,27)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.075.801.215,00	12.570.898.269,00	14.504.902.946,00	115,38
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.416.184.290,00	1.162.475.446,00	253.708.844,00	21,82
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	266.517.300,00	96.396.000,00	170.121.300,00	176,48
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00	84.150.000,00	(84.150.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	527.080.000,00	378.321.500,00	148.758.500,00	39,32
8.1.02.01.01.0046	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	17.065.823,00	38.951.911,00	(21.886.088,00)	(56,19)
8.1.02.01.01.0049	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	3.906.000,00	2.511.000,00	1.395.000,00	55,56
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.907.874.200,00	1.002.174.860,00	905.699.340,00	90,37
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	54.633.000,00	50.000.000,00	4.633.000,00	9,27
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	23.325.000,00	(23.325.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	197.522.150,00	48.960.000,00	148.562.150,00	303,44
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.847.000,00	19.600.000,00	247.000,00	1,26
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	0,00	144.700.000,00	(144.700.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	100,00
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	5.600.000,00	22.815.000,00	(17.215.000,00)	(75,45)
8.1.02.01.02.0003	Beban Komponen-Komponen Peralatan	5.600.000,00	22.815.000,00	(17.215.000,00)	(75,45)
8.1.02.02	Beban Jasa	11.433.348.112,45	10.235.458.795,00	1.197.889.317,45	11,70
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	10.180.364.919,00	8.942.280.345,00	1.238.084.574,00	13,85
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	491.588.000,00	300.581.600,00	191.006.400,00	63,55
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	546.900.000,00	753.550.000,00	(206.650.000,00)	(27,42)
8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	33.966.500,00	0,00	33.966.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	64.550.000,00	108.800.000,00	(44.250.000,00)	(40,67)
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	31.200.000,00	(31.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	105.009.000,00	0,00	105.009.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	376.793.800,00	104.292.000,00	272.501.800,00	261,29
8.1.02.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	61.630.000,00	0,00	61.630.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.491.718.000,00	5.539.198.000,00	(1.047.480.000,00)	(18,91)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	757.619.650,00	345.156.000,00	412.463.650,00	119,50
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	839.400.000,00	764.340.000,00	75.060.000,00	9,82
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.176.590.400,00	0,00	1.176.590.400,00	100,00
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	21.907.198,00	0,00	21.907.198,00	100,00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	1.731.600,00	(1.731.600,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	237.074.250,00	166.100.000,00	70.974.250,00	42,73
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	38.759.200,00	15.319.700,00	23.439.500,00	153,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	26.370.000,00	9.675.000,00	16.695.000,00	172,56
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	64.869.900,00	44.772.000,00	20.097.900,00	44,89
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	2.144.909,00	12.553.830,00	(10.408.921,00)	(82,91)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	37.251.574,00	23.705.647,00	13.545.927,00	57,14
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	479.423.492,00	453.000.651,00	26.422.841,00	5,83
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	36.721.000,00	31.294.400,00	5.426.600,00	17,34
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	159.002.596,00	157.832.671,00	1.169.925,00	0,74
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	42.411.200,00	35.875.000,00	6.536.200,00	18,22
8.1.02.02.01.0066	Beban Registrasi/Keanggotaan	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	43.664.250,00	43.302.246,00	362.004,00	0,84
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	414.371.778,00	482.949.280,00	(68.577.502,00)	(14,20)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	161.864.000,00	187.582.000,00	(25.718.000,00)	(13,71)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.711.778,00	295.367.280,00	(285.655.502,00)	(96,71)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12.139.800,00	0,00	12.139.800,00	100,00
8.1.02.02.02.0010	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	149.724.200,00	0,00	149.724.200,00	100,00
8.1.02.02.02.0011	Beban Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	80.932.000,00	0,00	80.932.000,00	100,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	294.977.700,00	118.654.000,00	176.323.700,00	148,60
8.1.02.02.04.0003	Beban Sewa Excavator	0,00	74.703.000,00	(74.703.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.800.000,00	10.100.000,00	(1.300.000,00)	(12,87)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	3.460.000,00	(3.460.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	286.177.700,00	15.850.000,00	270.327.700,00	1.705,54
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	0,00	2.997.000,00	(2.997.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0465	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	11.544.000,00	(11.544.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	213.463.170,00	(213.463.170,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	200.463.170,00	(200.463.170,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0010	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
8.1.02.02.07.0042	Beban Sewa Ternak Potong	10.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
8.1.02.02.08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	45.687.212,00	0,00	45.687.212,00	100,00
8.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	32.006.634,00	0,00	32.006.634,00	100,00
8.1.02.02.08.0005	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	3.492.086,00	0,00	3.492.086,00	100,00
8.1.02.02.08.0009	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	10.188.492,00	0,00	10.188.492,00	100,00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	63.408.750,00	0,00	63.408.750,00	100,00
8.1.02.02.09.0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	63.408.750,00	0,00	63.408.750,00	100,00
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	255.688.500,00	(255.688.500,00)	(100,00)
8.1.02.02.10.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	53.502.000,00	(53.502.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	197.524.500,00	(197.524.500,00)	(100,00)
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	4.662.000,00	(4.662.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	424.537.753,45	202.423.500,00	222.114.253,45	109,73
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	232.347.753,45	0,00	232.347.753,45	100,00
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	67.900.000,00	0,00	67.900.000,00	100,00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	124.290.000,00	202.423.500,00	(78.133.500,00)	(38,60)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	1.214.240.220,00	1.698.743.203,00	(484.502.983,00)	(28,52)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	484.911.420,00	540.057.620,00	(55.146.200,00)	(10,21)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	31.854.200,00	0,00	31.854.200,00	100,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	202.046.820,00	275.305.480,00	(73.258.660,00)	(26,61)
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	22.254.800,00	36.634.200,00	(14.379.400,00)	(39,25)
8.1.02.03.02.0045	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	31.086.000,00	(31.086.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0107	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0111	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	18.448.000,00	0,00	18.448.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.830.600,00	33.229.000,00	(398.400,00)	(1,20)
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	62.649.250,00	58.350.000,00	4.299.250,00	7,37
8.1.02.03.02.0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	8.660.000,00	19.430.000,00	(10.770.000,00)	(55,43)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	66.629.750,00	80.927.940,00	(14.298.190,00)	(17,67)
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	28.438.000,00	3.100.000,00	25.338.000,00	817,35
8.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	1.995.000,00	(1.995.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	266.257.300,00	890.787.083,00	(624.529.783,00)	(70,11)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	60.148.000,00	190.741.422,00	(130.593.422,00)	(68,47)
8.1.02.03.03.0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	206.109.300,00	700.045.661,00	(493.936.361,00)	(70,56)
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	463.071.500,00	267.898.500,00	195.173.000,00	72,85
8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	463.071.500,00	267.898.500,00	195.173.000,00	72,85
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	9.855.160.173,00	11.522.669.862,00	(1.667.509.689,00)	(14,47)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.855.160.173,00	11.522.669.862,00	(1.667.509.689,00)	(14,47)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.819.625.173,00	11.522.669.862,00	(1.703.044.689,00)	(14,78)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.535.000,00	0,00	35.535.000,00	100,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.500.000,00	347.154.299,00	(258.654.299,00)	(74,51)
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.500.000,00	89.000.000,00	(500.000,00)	(0,56)
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	88.500.000,00	89.000.000,00	(500.000,00)	(0,56)
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	258.154.299,00	(258.154.299,00)	(100,00)
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	258.154.299,00	(258.154.299,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**80.054.932.605,45**	**59.746.624.768,00**	**20.308.307.837,45**	**33,99**
8.1.08	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**27.808.241,67**	**2.327.690.755,00**	**(2.299.882.513,33)**	**(98,81)**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.601.036.657,00	(1.601.036.657,00)	(100,00)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	1.601.036.657,00	(1.601.036.657,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	1.601.036.657,00	(1.601.036.657,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	631.211.413,00	(631.211.413,00)	(100,00)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	631.211.413,00	(631.211.413,00)	(100,00)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	631.211.413,00	(631.211.413,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	11.756.865,00	(11.756.865,00)	(100,00)
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	11.756.865,00	(11.756.865,00)	(100,00)
8.1.08.03.01.0002	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	0,00	11.756.865,00	(11.756.865,00)	(100,00)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	73.118.620,00	(73.118.620,00)	(100,00)
8.1.08.04.02	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	73.118.620,00	(73.118.620,00)	(100,00)
8.1.08.04.02.0001	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	73.118.620,00	(73.118.620,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	27.808.241,67	10.567.200,00	17.241.041,67	163,16
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	27.808.241,67	10.567.200,00	17.241.041,67	163,16
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	21.151.975,00	10.567.200,00	10.584.775,00	100,17
8.1.08.06.01.0005	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	6.656.266,67	0,00	6.656.266,67	100,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**27.808.241,67**	**2.327.690.755,00**	**(2.299.882.513,33)**	**(98,81)**
	JUMLAH BEBAN	**80.082.740.847,12**	**62.074.315.523,00**	**18.008.425.324,12**	**29,01**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(79.066.240.847,12)**	**(61.601.370.023,00)**	**(17.464.870.824,12)**	**28,35**

Provinsi Kalimantan Timur, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 19741216 2006041006

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(L P E)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	36.146.072.694,61	35.722.574.917,61
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(79.066.240.847,12)	(61.601.370.023,00)
RK PPKD	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(617.899.400,00)	(2.099.185.722,00)
EKUITAS AKHIR	46.800.132.058,53	36.146.072.694,61

Provinsi Kalimantan Timur, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 197412162006041006

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	36.146.072.694,61	35.722.574.917,61
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(79.066.240.847,12)	(61.601.370.023,00)
RK PPKD	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(617.899.400,00)	(2.099.185.722,00)
Alat Komunikasi Telephone	(9.900.000,00)	0,00
Peralatan Mini Computer	(2.766.400,00)	0,00
Bangunan Peternakan/Perikanan	(605.233.000,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	46.800.132.058,53	36.146.072.694,61

Provinsi Kalimantan Timur, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi [illegible], S.P., M.T
NIP. 197412182006041006

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

NERACA

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	**ASET**	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**
1.1	**ASET LANCAR**	**1.753.322.350,00**	**932.071.470,00**
1.1.12	Persediaan	1.753.322.350,00	932.071.470,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**1.753.322.350,00**	**932.071.470,00**
		0,00	**0,00**
1.3	**ASET TETAP**	**44.441.602.876,20**	**34.835.294.398,61**
1.3.01	Tanah	2.670.241.600,00	2.670.241.600,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	37.391.612.333,66	34.380.513.334,66
1.3.03	Gedung dan Bangunan	36.489.762.725,20	29.894.553.246,61
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.240.892.050,00	1.240.892.050,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	3.723.356.053,00	3.723.356.053,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	94.183.500,00	94.183.500,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(37.168.445.385,66)	(37.168.445.385,66)
	JUMLAH ASET TETAP	**44.441.602.876,20**	**34.835.294.398,61**
		0,00	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**606.883.458,33**	**380.002.700,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	349.325.000,00	94.636.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	338.614.500,00	338.614.500,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(81.056.041,67)	(53.247.800,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**606.883.458,33**	**380.002.700,00**
	JUMLAH ASET	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**
		0,00	**0,00**
2	**KEWAJIBAN**	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
2.1.06	Utang Belanja	1.676.626,00	1.295.874,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
		0,00	**0,00**
3	**EKUITAS**	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
3.1	**EKUITAS**	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(79.066.240.847,12)	(61.601.370.023,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
	JUMLAH EKUITAS	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023

Provinsi Kalimantan Timur, 22-01-2025
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 197412162006041006

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	**ASET**	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**
1.1	**ASET LANCAR**	**1.753.322.350,00**	**932.071.470,00**
1.1.12	Persediaan	1.753.322.350,00	932.071.470,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.753.322.350,00	932.071.470,00
1.1.12.01.01	Bahan	1.622.847.850,00	782.855.350,00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.622.847.850,00	782.855.350,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	13.924.500,00	21.082.700,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	5.194.500,00	82.400,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	3.310.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	320.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	650.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	4.450.000,00	1.126.550,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	19.873.750,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	116.550.000,00	81.600.000,00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	116.550.000,00	81.600.000,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	46.533.420,00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	46.533.420,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**1.753.322.350,00**	**932.071.470,00**
		0,00	**0,00**
1.3	**ASET TETAP**	**44.441.602.876,20**	**34.835.294.398,61**
1.3.01	Tanah	2.670.241.600,00	2.670.241.600,00
1.3.01.01	Tanah	2.670.241.600,00	2.670.241.600,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	2.670.241.600,00	2.670.241.600,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.670.241.600,00	2.670.241.600,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	37.391.612.333,66	34.380.513.334,66
1.3.02.01	Alat Besar	804.821.100,00	4.345.000,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	791.026.100,00	0,00
1.3.02.01.01.0001	Tractor	48.526.100,00	0,00
1.3.02.01.01.0003	Excavator	742.500.000,00	0,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	13.795.000,00	4.345.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	13.795.000,00	4.345.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	3.241.406.402,00	2.608.443.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.241.406.402,00	2.608.443.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.025.172.000,00	1.025.172.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	426.410.000,00	426.410.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.433.121.000,00	940.521.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	356.703.402,00	216.340.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	52.083.000,00	6.283.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	4.450.000,00	4.450.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	4.450.000,00	4.450.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	47.633.000,00	1.833.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	37.500.000,00	0,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	1.833.000,00	1.833.000,00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	8.300.000,00	0,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	284.834.830,00	125.190.080,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	284.834.830,00	125.190.080,00
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	15.800.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	3.500.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0006	Alat Processing	7.050.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0009	Alat-Alat Peternakan	258.484.830,00	125.190.080,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.475.172.245,66	28.089.453.745,66
1.3.02.05.01	Alat Kantor	27.797.693.645,66	27.718.748.645,66
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	14.226.990,00	14.226.990,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	65.180.000,00	65.180.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26.140.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	27.692.146.655,66	27.639.341.655,66
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	646.468.900,00	339.695.400,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	175.670.400,00	141.045.400,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	56.795.500,00	35.215.500,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	178.223.000,00	118.984.500,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	15.450.000,00	4.050.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	220.330.000,00	40.400.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.009.700,00	31.009.700,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	10.132.200,00	10.132.200,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	7.432.000,00	7.432.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	13.445.500,00	13.445.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	369.444.400,00	264.909.400,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	339.554.400,00	259.569.400,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	20.940.000,00	6.750.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	221.704.400,00	164.009.400,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	96.910.000,00	88.810.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	19.200.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	19.200.000,00	0,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	10.690.000,00	5.340.000,00
1.3.02.06.03.0045	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	5.340.000,00	5.340.000,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	5.350.000,00	0,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	608.958.949,00	457.918.049,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	456.666.949,00	305.626.049,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	91.583.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya	365.083.949,00	305.626.049,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	152.292.000,00	152.292.000,00
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	152.292.000,00	152.292.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	1.653.942.060,00	1.546.242.060,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	1.597.472.500,00	1.489.772.500,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	1.380.272.500,00	1.295.572.500,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	194.900.000,00	171.900.000,00
1.3.02.08.01.0016	Alat Laboratorium Hematologi	22.300.000,00	22.300.000,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15.207.000,00	15.207.000,00
1.3.02.08.02.0001	Analytical Instrument	15.207.000,00	15.207.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	41.262.560,00	41.262.560,00
1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	41.262.560,00	41.262.560,00
1.3.02.10	Komputer	1.900.949.347,00	1.277.729.000,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.454.306.750,00	1.034.091.000,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	47.400.000,00	47.400.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.389.506.750,00	986.691.000,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	17.400.000,00	0,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	446.642.597,00	243.638.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	387.412.599,00	191.408.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	59.229.998,00	52.230.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	36.489.762.725,20	29.894.553.246,61
1.3.03.01	Bangunan Gedung	36.489.762.725,20	29.894.553.246,61
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.489.762.725,20	29.894.553.246,61
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	31.383.946.439,61	29.832.578.116,61
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	61.975.130,00	61.975.130,00
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Peternakan/Perikanan	5.043.841.155,59	0,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.240.892.050,00	1.240.892.050,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1.180.290.050,00	1.180.290.050,00
1.3.04.01.01	Jalan	1.180.290.050,00	1.180.290.050,00
1.3.04.01.01.0002	Jalan Provinsi	1.180.290.050,00	1.180.290.050,00
1.3.04.02	Bangunan Air	60.602.000,00	60.602.000,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	60.602.000,00	60.602.000,00
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Air Irigasi Lainnya	60.602.000,00	60.602.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	3.723.356.053,00	3.723.356.053,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.723.356.053,00	3.723.356.053,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.723.356.053,00	3.723.356.053,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.723.356.053,00	3.723.356.053,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	94.183.500,00	94.183.500,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	94.183.500,00	94.183.500,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	94.183.500,00	94.183.500,00
1.3.06.03.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	94.183.500,00	94.183.500,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(37.168.445.385,66)	(37.168.445.385,66)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(27.538.210.280,66)	(27.538.210.280,66)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(24.899.782.481,66)	(24.899.782.481,66)
1.3.07.01.01.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(24.899.782.481,66)	(24.899.782.481,66)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.638.427.799,00)	(2.638.427.799,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(2.638.427.799,00)	(2.638.427.799,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.821.390.118,00)	(7.821.390.118,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(7.821.390.118,00)	(7.821.390.118,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(7.821.390.118,00)	(7.821.390.118,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(890.024.145,00)	(890.024.145,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(890.024.145,00)	(890.024.145,00)
1.3.07.03.01.0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	(107.535.451,00)	(107.535.451,00)
1.3.07.03.01.0006	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol	(782.488.694,00)	(782.488.694,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(918.820.842,00)	(918.820.842,00)
1.3.07.04.01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(73.118.620,00)	(73.118.620,00)
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(73.118.620,00)	(73.118.620,00)
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(845.702.222,00)	(845.702.222,00)
1.3.07.04.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(845.702.222,00)	(845.702.222,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**44.441.602.876,20**	**34.835.294.398,61**
		0,00	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**606.883.458,33**	**380.002.700,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	349.325.000,00	94.636.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	349.325.000,00	94.636.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	349.325.000,00	94.636.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	249.481.000,00	94.636.000,00
1.5.03.01.01.0006	Kajian	99.844.000,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	338.614.500,00	338.614.500,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	338.614.500,00	338.614.500,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	338.614.500,00	338.614.500,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	322.614.500,00	322.614.500,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	16.000.000,00	16.000.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(81.056.041,67)	(53.247.800,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(81.056.041,67)	(53.247.800,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(81.056.041,67)	(53.247.800,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(74.399.775,00)	(53.247.800,00)
1.5.05.01.01.0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(6.656.266,67)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**606.883.458,33**	**380.002.700,00**
	JUMLAH ASET	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**
		0,00	**0,00**
2	**KEWAJIBAN**	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
2.1.06	Utang Belanja	1.676.626,00	1.295.874,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.676.626,00	1.295.874,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	1.676.626,00	1.295.874,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.676.626,00	1.295.874,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**1.676.626,00**	**1.295.874,00**
		0,00	**0,00**
3	**EKUITAS**	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
3.1	**EKUITAS**	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
3.1.01	Ekuitas	(43.538.067.552,51)	(27.977.980.827,39)
3.1.01.01	Ekuitas	35.528.173.294,61	33.623.389.195,61
3.1.01.01.01	Ekuitas	35.528.173.294,61	33.623.389.195,61
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	35.528.173.294,61	33.623.389.195,61
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(79.066.240.847,12)	(61.601.370.023,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(79.066.240.847,12)	(61.601.370.023,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(79.066.240.847,12)	(61.601.370.023,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
3.1.03.01	RK PPKD	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	90.338.199.611,04	64.124.053.522,00
	JUMLAH EKUITAS	**46.800.132.058,53**	**36.146.072.694,61**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023

Provinsi Kalimantan Timur, 22-01-2025
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 197412162006041006

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

CALK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis bidang peternakan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;

8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2024 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relavan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan ini meliputi:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim sebagai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.

- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD TA. 2024;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/019/BPKAD -IV/2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
18. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/18742/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Awal Tahun Anggaran 2025 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian tarbet kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
- 3.1. Iktisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
5.1.1 Pendapatan
5.1.2. Belanja
5.1.3. Pendapatan LO
5.1.4. Beban LO
5.1.5. Aset
5.1.6. Kewajiban
5.1.7. Ekuitas
5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya[1], dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,54% (yoy) Tingkat inflasi tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,55 (yoy) Terkendalinya inflasi ini tidak lepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim bersama TPID di kabupaten/kota, yang terus mengantisipasi kenaikan harga pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dengan kondisi ekonomi makro ini diharapkan dapat menunjang misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya. Ekonomi makro yang membaik berkorelasi positif dengan kenaikan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan semakin besarnya dana yang dapat dialokasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya APBD Perubahan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2024 mendapatkan tambahan anggaran belanja perubahan sebesar Rp875.000.000,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp97.319.276.216,00 sehingga total anggaran perubahan sebesar Rp875.000.000,00 Peningkatan anggaran belanja sebesar 0,99% tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat melalui program kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun perubahan anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

[1] https://kaltim.bps.go.id/indicator/3/202/1/inflasi-kumulatif.html

Tabel 1. Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2024

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:				**80.320.505.324,00**	**875.000.000,00**		**81.195.505.324,00**
01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**37.000.045.242,00**			
01	**01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.802.758.221,00**		**-12.850.000,00**	**1.789.908.221,00**
01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	528.979.035,00		-12.850.000,00	516.129.035,00
01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	63.568.490,00			63.568.490,00
01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.044.300,00			20.044.300,00
01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-30.000.000,00	244.474.910,00
01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.000.000,00		945.691.486,00
01	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.178.786.845,00**			**26.178.786.845,00**
01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.150.944.165,00			25.150.944.165,00
01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	733.000.000,00			733.000.000,00
01	02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.026.120,00			39.026.120,00
01	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.910.000,00			35.910.000,00
01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	129.746.560,00			129.746.560,00
01	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	90.160.000,00			90.160.000,00
01	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**141.560.500,00**		**-33.660.000,00**	**107.900.500,00**
01	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.370.000,00			10.370.000,00
01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	78.460.500,00		-33.660.000,00	44.800.500,00
01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.730.000,00			52.730.000,00
01	**05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**468.849.100,00**			**468.849.100,00**
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.445.000,00			95.445.000,00
01	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.580.000,00			15.580.000,00
01	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	93.160.000,00			93.160.000,00
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan	264.664.100,00			264.664.100,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
			Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
01	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.642.582.942,00**	**64.500.000,00**		**1.707.082.942,00**
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.749.354,00			30.749.354,00
01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	725.722.702,00			725.722.702,00
01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	149.560.800,00			149.560.800,00
01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.252.000,00			33.252.000,00
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	703.298.086,00	64.500.000,00		767.798.086,00
01	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**686.892.328,00**			**686.892.328,00**
01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	565.950.000,00			565.950.000,00
01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.942.328,00			120.942.328,00
01	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.948.899.419,00**	**12.850.000,00**		**4.961.749.419,00**
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.668.000,00			16.668.000,00
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.843.675,00			422.843.675,00
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.509.387.744,00	12.850.000,00		4.522.237.744,00
01	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.129.715.887,00**		**-30.840.000,00**	**1.098.875.887,00**
01	09	02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	317.032.200,00			317.032.200,00
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.440.500,00			112.440.500,00
01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	160.680.597,00		-64.500.000,**00**	96.180.597,00
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	539.562.590,00		33.660.000,00	573.222.590,00
02	**01**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**30.011.661.369,00**			**30.011.661.369**
02	**01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**2.722.568.620,00**			**2.722.568.620,00**

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
02	01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.647.614.040,00			1.647.614.040,00
02	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.074.954.580,00			1.074.954.580,00
02	**04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provi**	**3.202.995.332,00**			**3.202.995.332,00**
02	04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.689.889.365,00			1.689.889.365,00
02	04	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.513.105.967,00			1.513.105.967,00
02	**05**		**Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**2.420.718.764,00**			**2.420.718.764,00**
02	05	04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	731.529.500,00			731.529.500,00
02	05	05	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	1.689.189.264,00			1.689.189.264,00
02	**06**		**Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**424.533.658,00**			**424.533.658,00**
02	06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	424.533.658,00			424.533.658,00
02	**07**		**Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**21.240.844.995,00**			**21.240.844.995,00**
02	07	04	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	21.240.844.995,00			21.240.844.995,00
03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**4.328.314.220,00**			**5.203.314.220,00**
03	**01**		**Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian**	**4.328.314.220,00**			**5.203.314.220,00**
03	01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4.328.314.220,00	875.000.000,00		5.203.314.220,00
04			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**7.166.842.990,00**			**7.166.842.990,00**
04	**01**		**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**3.497.481.104,00**			**3.497.481.104,00**

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
04	01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	1.085.320.000,00			1.085.320.000,00
04	01	04	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	291.319.700,00			291.319.700,00
04	01	05	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1.760.511.060,00			1.760.511.060,00
04	01	09	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	360.330.344,00			360.330.344,00
04	**02**		**Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**1.096.638.030,00**			**1.096.638.030,00**
04	02	04	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	793.217.390,00			793.217.390,00
04	02	05	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	303.420.640,00			303.420.640,00
04	**03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**2.206.393.512,00**			**2.206.393.512,00**
04	03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	333.551.906,00			333.551.906,00
04	03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	539.908.321,00			539.908.321,00
04	03	04	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	105.110.115,00			105.110.115,00
04	03	05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	324.931.241,00			324.931.241,00
04	03	06	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	315.750.573,00			315.750.573,00
04	03	07	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	370.610.115,00			370.610.115,00
04	03	08	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	216.531.241,00			216.531.241,00
04	**04**		**Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**366.330.344,00**			**366.330.344,00**
04	04	03	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	366.330.344,00			366.330.344,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
06			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**393.236.403,00**			**393.236.403,00**
06	**01**		**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**393.236.403,00**			**393.236.403,00**
06	01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	54.873.403,00			54.873.403,00
06	01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	338.363.000,00			338.363.000,00
07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**1.420.405.100,00**			**1.420.405.100,00**
07	**02**		**Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**568.165.100,00**			**568.165.100,00**
07	02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	255.687.600,00			255.687.600,00
07	02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	312.477.500,00			312.477.500,00
07	**03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**852.240.000,00**			**852.240.000,00**
07	03	05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	456.871.000,00			456.871.000,00
07	03	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	395.369.000,00			395.369.000,00
UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK:				**13.252.792.343,00**			**13.252.792.343,00**
01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.354.884.968,00**			11.354.884.968,00
01	**02**		**Kegiaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**146.400.000,00**			**146.400.000,00**
01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146.400.000,00			146.400.000,00
01	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**87.205.000,00**			87.205.000,00
01	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.655.000,00			6.655.000,00
01				03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19.102.000,00
01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61.448.000,00			61.448.000,00
01	**05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**75.625.200,00**			**75.625.200,00**
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.177.000,00			48.177.000,00
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.448.200,00			27.448.200,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**426.574.776,00**	**45.586.900,00**		**472.161.676,00**
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.988.800,00			10.988.800,00
01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.816.736,00	45.586.900,00		206.403.636,00
01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.101.000,00			12.101.000,00
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.668.240,00			242.668.240,00
01	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**140.327.250,00**	**777.545.900,00**		**917.873.150,00**
01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.327.250,00	777.545.900,00		917.873.150,00
01	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.408.475.422,00**			**2.408.475.422,00**
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.780.000,00			14.780.000,00
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.499.186,00			105.499.186,00
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.288.196.236,00			2.288.196.236,00
01	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.070.277.320,00**		**-823.132.800,00**	**7.247.144.520,00**
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.522.500,00			180.522.500,00
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.897.400,00			136.897.400,00
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.752.857.420,00		-823.132.800,00	6.929.724.620,00
02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.897.907.375,00**			**1.897.907.375,00**
02	**03**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**1.897.907.375,00**			**1.897.907.375,00**
02	03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	763.560.220,00			763.560.220,00
02	03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.134.347.155,00			1.134.347.155,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET:				**3.745.978.549,00**			**3.745.978.549,00**
01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**2.212.927.294,00**			**2.212.927.294,00**
01	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**114.840.000,00**			**114.840.000,00**
01 Pelaksanaan Tugas ASN	02	02	Penyediaan Administrasi	114.840.000,00			114.840.000,00
01	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**39.348.440,00**			**39.348.440,00**
01	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18.409.500,00			18.409.500,00
01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.041.200,00			10.041.200,00
01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.897.740,00			10.897.740,00
01	05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**153.050.000,00**			**153.050.000,00**
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61.050.000,00			61.050.000,00
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.000.000,00			92.000.000,00
01	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**339.260.878,00**			**339.260.878,00**
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.994.250,00			9.994.250,00
01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.539.958,00			139.539.958,00
01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.072.270,00			25.072.270,00
01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.878.400,00			3.878.400,00
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.776.000,00			160.776.000,00
01	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**228.887.020,00**			**228.887.020,00**
01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.340.000,00			73.340.000,00
01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.547.020,00			155.547.020,00
01	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.112.077.756,00**			**1.112.077.756,00**
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.612.500,00			16.612.500,00
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.701.500,00			189.701.500,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	905.763.756,00			905.763.756,00
01	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**225.463.200,00**			**225.463.200,00**
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.414.000,00			7.414.000,00
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.807.600,00			151.807.600,00
01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	48.302.800,00			48.302.800,00
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.938.800,00			17.938.800,00
04			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**1.533.051.255,00**			**1.533.051.255,00**
04	**03**		**Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**1.533.051.255,00**			**1.533.051.255,00**
04	03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.533.051.255,00			1.533.051.255,00

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efesien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam

satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu.

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.016.500.000,00 atau 263,49% nilai ini melampaui dari targetnya sebesar Rp385.790.000. Bila dibandingkan pada tahun lalu sebesar Rp472.945.500,00 maka dapat diketahui terjadi peningkatan sebesar 543.554.500,00 atau sebesar 114,93%.

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp91.354.699.611,04 atau 93,03% dari anggaran sebesar Rp98.194.276.216,00 Bila dibandingkan pada tahun lalu sebesar Rp64.596.999.022,00 maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp26.757.700.589,04 atau sebesar 41,42%. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:				**81.195.505.324,00**			
01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**37.000.045.242,00**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian** **Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti**	**93,30** **100**	**Indeks** **%**
01	**01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.789.908.221,00**	**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu**	**90,00**	**%**
01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	516.129.035,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen
01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	63.568.490,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen
01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.044.300,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen
01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	244.474.910,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan
01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	945.691.486,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan
01	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.178.786.845,00**	**Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran**	**90,00**	**Skor**
01	02	01	Penyediaan Gaji dan	25.150.944.165,00	Jumlah Orang yang Menerima	99,00	Orang/bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
			Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN		
01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	733.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen
01	02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.026.120,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen
01	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.910.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen
01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	129.746.560,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
01	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	90.160.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen
01	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**107.900.500,00**	**Tingkat Pengelolaan administrasi BMD**	**80,00**	**%**
01	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.370.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen
01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	44.800.500,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen
01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.730.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan
01	**05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**468.849.100,00**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**80**	**%**
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.445.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket
01	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.580.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen
01	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	93.160.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	264.664.100,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57	Orang
01	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.707.082.942,00**	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	**80**	**%**
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.749.354,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket
01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	725.722.702,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	173	Paket
01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	149.560.800,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket
01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.252.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	767.798.086,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
01	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**686.892.328,00**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah**	**80**	**%**
01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas	565.950.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3	Unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
			Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.942.328,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit
01	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.961.749.419,00**	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80**	**%**
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.668.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.843.675,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.522.237.744,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan
01	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.098.875.887,00**	**Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik**	**80**	**%**
01	09	02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	317.032.200,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67	Unit
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.440.500,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	159	Unit
01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	96.180.597,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4	Unit
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	573.222.590,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit
02	**01**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**30.011.661.369,00**	**- Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis** **- Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan**	**96,21** **87,53**	**Skor** **Skor**
02	**01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**2.722.568.620,00**	-Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi -Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak -Jumlah produksi pupuk asal KOHE -Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas -Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	**625** **860** **385.000** **37,04** **25,00**	**KK** **Rupiah** **Ton** **%** **%**
02	01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.647.614.040,00	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4	Laporan
02	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.074.954.580,00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1	Dokumen
02	**04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provi**	**3.202.995.332,00**	**-Jumlah bibit sapi ber-SKLB** **-Jumlah usaha ternak (aneka ternal/plasma nuthfa)** **-Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar** **-Persentase Calving Rate** **-Pertumbuhan Upgrade Closed house**	**175** **108** **1,95** **61** **50**	**Ekor** **Unit Usaha** **%** **%** **%**
02	04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi	1.689.889.365,00	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi	1	Dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
			Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi		
02	04	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.513.105.967,00	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak.Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	3	Laporan
02	**05**		**Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**2.420.718.764,00**	**-Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan** **-Luasan HPT**	**18** **1.150**	**Unit** **Ha**
02	05	04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	731.529.500,00	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	2	Laporan
02	05	05	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	1.689.189.264,00	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan.Pakan yang Beredar	1	Dokumen
02	**06**		**Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**424.533.658,00**	**Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/ berkhasiat/aman**	**29,58**	**%**
02	06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	424.533.658,00	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4	Laporan
02	**07**		**Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**21.240.844.995,00**	**Jumlah Pengadaan Ternak**	**2.700**	**Indukan/ Bibit**
02	07	04	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	21.240.844.995,00	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	3.527	Ekor
03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.203.314.220,00**	**Tingkat pemenuhan prasarana peternakan**	**99,54**	**Skor**
03	**01**		**Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian**	**5.203.314.220,00**	- Jumlah Investasi di Bidang Peternakan -Jumlah Nilai Akses pembiayaan -Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	**3** **107** **134**	**Unit** **Milyar/Rupiah** **Ha**
03	01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	5.203.314.220,00	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4	Dokumen
04			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**7.166.842.990,00**	**-Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ** **-Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner**	**91,79** **95,11**	**Skor** **Skor**
04	**01**		**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**3.497.481.104,00**	**-Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)** **-Persentase pelayanan kesehatan hewan** **-Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis** **-Tingkat kesembuhan GANGREP**	**64** **43,50** **20** **76,50**	**Kecamatan** **%** **%** **%**
04	01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	1.085.320.000,00	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Penyakit Hewan dan Zoonosis	12	Laporan
04	01	04	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan	291.319.700,00	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan	30	Wilayah

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
			Zoonosis pada Hewan		zoonosis pada Hewan		
04	01	05	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1.760.511.060,00	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12	Laporan
04	01	09	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	360.330.344,00	Jumlah kader zoonosis	50	Orang
04	**02**		**Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**1.096.638.030,00**	**-persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan** **-Persentase penurunan resiko masukknya PHMSZ**	**72,00** **3,20**	**%** **%**
04	02	04	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	793.217.390,00	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	12	Laporan
04	02	05	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	303.420.640,00	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2	Laporan
04	**03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**2.206.393.512,00**	**-jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting** **-Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ** **-Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)** **-Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif** **-Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan**	**27,50** **23,00** **81,00** **24,48** **1,32**	**Gram/hari** **Unit** **%** **%** **%**
04	03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	333.551.906,00	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	8,00	Unit
04	03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	539.908.321,00	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2,00	Laporan
04	03	04	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	105.110.115,00	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	5,00	Unit Usaha
04	03	05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	324.931.241,00	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10,00	Unit Usaha
04	03	06	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	315.750.573,00	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30,00	Unit Usaha
04	03	07	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	370.610.115,00	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400,00	Orang
04	03	08	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	216.531.241,00	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	1,00	Produk
04	**04**		**Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**366.330.344,00**	**Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran**	**58,00**	**%**

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
					produk hewan		
04	04	03	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	366.330.344,00	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	50	Dokumen
06			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**393.236.403,00**	**Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan**	**99,35**	**Skor**
06	**01**		**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**393.236.403,00**	**-Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan** **-Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice**	**114** **32,90**	**Unit** **%**
06	01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	54.873.403,00	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	395	Dokumen
06	01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	338.363.000,00	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4	Laporan
07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**1.420.405.100,00**	**Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan**	**99,74**	**Skor**
07	**02**		**Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**568.165.100,00**	**-Jumlah pembudidaya unggas** **-Persentase jumlah peternak milenial** **-Rasio SD komoditas/ produk peternakan**	**1249.215** **75,00** **1,15**	**RTUP** **%** **Rasio**
07	02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	255.687.600,00	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3	Dokumen
07	02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	312.477.500,00	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	17	Kelompok
07	**03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**852.240.000,00**	**Jumlah Desa Korporasi Ternak**	**9**	**Unit**
07	03	05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	456.871.000,00	Jumlah korporasi petani yang didampingi	10	Unit
07	03	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	395.369.000,00	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	9	Unit
UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK:				**13.252.792.343,00**			
01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.354.884.968,00**	**-Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti** **-Indeks kualitas layanan kesekretariatan**	**100** **93,30**	**%** **Indeks**
01	**02**		**Kegiaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**146.400.000,00**	**Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran**	**90**	**Score**
01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146.400.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen
01	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**87.205.000,00**	**Tingkat Pengelolaan administrasi BMD**	**80,00**	**Score**
01	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.655.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen
01	03	02	Pengamanan Barang Milik	19.102.000,00	Jumlah Dokumen	4	Dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
			Daerah SKPD		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61.448.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dokumen
01	**05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**75.625.200,00**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**80**	**%**
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.177.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.448.200,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang
01	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**472.161.676,00**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum**	**80**	**%**
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.988.800,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket
01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.403.636,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53	Paket
01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.101.000,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.668.240,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
01	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**917.873.150,00**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah**	**80**	**%**
01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	917.873.150,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit
01	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.408.475.422,00**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80**	**%**
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.780.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.499.186,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.288.196.236,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan
01	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.247.144.520,00**	**Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik**	**80**	**%**
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.522.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	Unit
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.897.400,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62	Unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.929.724.620,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit
02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.897.907.375,00**	**Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**88,54**	**Skor**
02	**03**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**1.897.907.375,00**	**-angka kelahiran** **-Angka kematian ternak** **-Calving Interval** **-Jumlah PAD** **-Jumlah Populasi Ternak/Hewan** **-Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi** **-Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan** **-Jumlah produksi pupuk** **-Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB**	**25,50** **2,13** **17,01** **1113juta** **133,70** **10.000,00** **1500** **10** **0**	**%** **%** **Bulan** **Rupiah** **ST** **Stek/pols** **Ton** **Ton** **%**
02	03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	763.560.220,00	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12	Laporan
02	03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.134.347.155,00	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12	Laporan
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET:				**3.745.978.549,00**			
01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.212.927.294,00**	**-Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di -Tindak Lanjuti** **Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100** **93,30**	**%** **Skor**
01	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**114.840.000,00**	**Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**90**	**Skor**
01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.840.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen
01	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**39.348.440,00**	**Tingkat Pengelolaan administrasi BMD**	**80**	**Skor**
01	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18.409.500,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen
01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.041.200,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen
01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.897.740,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan
01	05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**153.050.000,00**	**Tingkat Pengelolaan kepegawaian**	80	Skor
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61.050.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang
01	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**339.260.878,00**	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**80**	**%**
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.994.250,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket
01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.539.958,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket
01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.072.270,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket
01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.878.400,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.776.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
01	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**228.887.020,00**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah**	**80**	**%**
01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.340.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit
01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.547.020,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit
01	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.112.077.756,00**	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80**	**%**
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.612.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.701.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	905.763.756,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan
01	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**225.463.200,00**	**Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80**	**%**
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.414.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.807.600,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit
01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	48.302.800,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	Unit
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.938.800,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
04			**PROGRAM PENGENDALIAN**	**1.533.051.255,00**	**Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan**	**98,68**	**Skor**

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
			KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		**Hewan dan Kesehatan Masyarakat**		
04	**03**		**Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**1.533.051.255,00**	-Peningkatan Jumlah PAD -Peningkatan Kepuasan pelanggan -Peningkatan Ruang lingkup pengujian	190jt 84 39	Rupiah Skor Absolut
04	03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.533.051.255,00	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	400	Dokumen

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2024 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2024 dapat diuraikan berdasarkan sub unit Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 6 Program, 21 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp81.195.505.324,00, untuk UPTD Pembibtan dan Hijauan Pakan Ternak memiliki 2 Program, 8 Kegiatan, 19 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp13.252.792.343,00 dan Untuk UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Ternak memiliki 2 Program, 8 Kegiatan, 21 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp3.745.978.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (3.27.01.1.01)

- ***Sub Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (01.1.01.01)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp516.129.035,00 dan terealisasi sebesar Rp491.735.320,00 atau 95,27%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp823.353.552,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp331.618.232,00 atau -40,28% dari tahun lalu, karena anggaran tahun ini memang lebih besar dari tahun 2024. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (01.1.01.02)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp63.568.490,00 dan terealisasi sebesar Rp58.691.500,00 atau 92,33%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (01.1.01.04)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp20.044.300,00 dan terealisasi sebesar Rp17.718.000,00 atau 88,39%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.1.01.06)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp244.474.910,00 dan terealisasi sebesar Rp237.385.900,00 atau 97,10%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01.1.01.07)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp94.569.1486,00 dan terealisasi sebesar Rp839.273.839,00 atau 88,75% Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp482.350.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp356.923.839,00 atau 74,00% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (3.27.01.1.02)

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (01.1.02.01)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp25.150.944.165,00 dan terealisasi sebesar Rp21.778.035.316,00 atau 86,59%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp15.579.082.819,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.198.952.497,00 atau 39,79%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (01.1.02.02)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp733.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp674.740.000,00 atau 92,05%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (01.1.02.003)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp39.026.120,00 dan terealisasi sebesar Rp37.964.735,00 atau 97,28%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp24.800.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.164.735,00 atau 53,08%. Target yang telah ditetapkan telah tercapai selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (01.1.02.006)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp35.910.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.613.724,00 atau 99,17%. Target yang telah ditetapkan telah tercapai selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (01.1.02.07)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp129.746.560,00 dan terealisasi sebesar Rp125.849.715,00 atau 97,00%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp211.363.800,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp85.514.085,00 atau -40,46%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (01.1.02.08)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp90.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp87.261.336,00 atau 96,78%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (3.27.01.1.03)

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.01)***

  Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ini baru ada di tahun 2024 dengan pagu anggaran senilai Rp 10.370.000,00

terealisasi senilai Rp9.121.000,00 atau 87,96% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain adanya efisiensi pengeluaran belanja.

- ***Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.02)***

  Sub kegiatan ini baru ada di tahun 2024 dengan pagu anggaran senilai Rp44.800.500,00 terealisasi senilai Rp44.330.500,00 atau 98,95% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain adanya efisiensi pengeluaran belanja.

- ***Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (01.1.03.06)***

  Sub kegiatan ini baru ada di tahun 2024 dengan pagu anggaran senilai Rp 52.730.000,00 terealisasi senilai Rp52.707.915,00 atau 99,96% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain adanya efisiensi pengeluaran belanja.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.27.01.1.05)

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (01.1.05.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dianggarkan sebesar Rp95.445.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.91.350.000,00 atau 95,71%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp196.160.000,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp104.810.000,00,00 atau 53,43% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (01.1.05.03)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp15.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 15.111.500,00 atau 96,99% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain adanya efisiensi pengeluaran belanja 2024.

- ***Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (01.1.05.05)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp93.160.000 dan terealisasi sebesar Rp90.308.013,00 atau 96,94% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain adanya efisiensi pengeluaran belanja 2024.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (01.1.05.09)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dianggarkan sebesar Rp264.664.100,00 dan terealisasi sebesar Rp260.735.717,00,00 atau 98,52%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp307.539.444,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp46.803.727,00atau 15,22%. Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi disebabkan karena kegiatan diklat yang akan diikuti adalah berdasarkan surat undangan yang diterima SKPD pada tahun 2024.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (3.27.01.1.06)

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.1.06.01)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp30.749.354,00 dan terealisasi sebesar Rp30.718.450,00 atau 99,90%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp23.464.800,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.253.650,00 atau 30,91%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.1.06.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp725.722.702,00 dan terealisasi sebesar Rp709.665.674,00 atau 97,79%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp111.021.500,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp598.644.174,00 atau 539,21% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (01.1.06.05)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp149.560.800,00,00 dan terealisasi sebesar Rp148.393.500,00 atau 99,22%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp149.827.800,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp1.434.300,00 atau -0,96%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (01.1.06.06)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp33.252.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.201.000,00 atau 99,85%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp20.000.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.201.000,00 atau 66,01%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (01.1.06.09)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp767.798.086,00 dan terealisasi sebesar Rp744.646.893,00 atau 96,98%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.403.980.442,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp659.333.549,00 atau -46,96% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada belanja selama tahun 2024.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.27.01.1.07)

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (01.1.07.02)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp565.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 565.062.188,00atau 99,84%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp863.400.000,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp298.337.812,00 atau -34,55%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (01.1.07.06)***

Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp120.942.328,00 dan terealisasi sebesar Rp112.683.250,00 atau 93,17 % meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.01.1.08)

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (01.1.08.01)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp16.668.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.887.000,00 atau 89,31%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp18.905.450,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp4.018.450,00 atau -21,26%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.1.08.02)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp422.843.675,00 dan terealisasi sebesar Rp404.670.619,00 atau 95,70%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp397.549.497,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.121.122,00 atau 1,79%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (01.1.08.04)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.522.237.744,00 dan terealisasi sebesar Rp4.272.681.740,00 atau 98,58%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp4.075.697.760,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp196.983.980,00 atau 4,83%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.01.1.09)

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (01.1.09.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp317.032.200,00 dan terealisasi sebesar Rp299.713.018,00 atau 94,54%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp30.717.104,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp268.995.914,00 atau 875,72%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (01.1.09.06)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp112.440.500,00 dan terealisasi sebesar Rp109.786.160,00 atau 97,64%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp491.406.962,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp381.620.802,00 atau -77,66%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (ATB) (01.1.09.08)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp96.180.597,00 dan terealisasi sebesar Rp94.257.578,00 atau 98,00%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (01.1.09.09)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp573.222.590,00 dan terealisasi sebesar Rp566.016.925,00 atau 98,74%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp932.960.584,00 maka terjadi penurunan sebesar -366.943.659 atau -39,33% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

II. Program Peyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (3.27.02.1.01)

- ***Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (02.1.01.01)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.647.614.040,00 dan terealisasi sebesar Rp1.329.855.651,00 atau 80,71%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp524.037.512,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp805.818.139,00 atau 153,77% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (02.1.01.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.074.954.580,00 dan terealisasi sebesar Rp825.922.021,00 atau 76,83%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.012.211.704,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp186.289.683,00 atau -18,40% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

2. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan (3.27.02.1.04)

- ***Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (02.1.04.01)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.689.889.365,00 dan terealisasi sebesar Rp1.457.230.156,00 atau 86,23%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.075.735.300,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp381.494.856,00 atau 35,46% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (02.1.04.04)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.513.105.967,00 dan terealisasi sebesar Rp1.432.873.830,00 atau 94,70%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp926.027.980,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp506.845.850,00 atau 54,73% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

3. **Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (3.27.02.1.05)**

   - ***Sub Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (02.1.05.04)***

     Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp731.529.500,00 dan terealisasi sebesar Rp726.162.599,00 atau 99,27%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp346.448.085,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp379.714.514,00 atau 109,60% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

   - ***Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (02.1.05.05)***

     Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.689.189.264,00 dan terealisasi sebesar Rp1.548.059.493,00 atau 91,65%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp222.140.302,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.325.919.191,00 atau 596,88% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

4. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor (3.27.02.1.06)

- ***Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan (02.1.06.01)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp424.533.658,00 dan terealisasi sebesar Rp411.007.000,00 atau 96,81%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp346.556.731,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp64.450.269,00 atau 18,60% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

5. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (3.27.02.1.07)

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (02.1.07.04)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp21.240.844.995,00 dan terealisasi sebesar Rp20.547.405.668,00 atau 96,74%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp7.170.177.023,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.377.228.645,00 atau 186,57%. Persentase kenaikan tinggi dikarenakan realisasi kegiatan terealisasi semua terutama untuk pengadaan ternak untuk tahun ini semua dapat terealisasi berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024 ini realisasi sub kegiatan inI cukup tinggi hingga mencapai 96,74%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian (3.27.03.1.01)

- ***Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (03.1.01.01)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.309.353.900,00 dan terealisasi sebesar Rp5.092.314.384,00 atau 97,87%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp5.288.661.726,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp196.347.342,00 atau -3,71 meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

1V. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (3.27.04.1.01)

- ***Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (04.1.01.03)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.085.320.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.070.553.870,00 atau 98,64%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp734.432.600,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp365.342.600,00 atau 98,98%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (04.1.01.04)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp291.319.700,00 dan terealisasi sebesar Rp282.285.544,00 atau 96,90%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (04.1.01.05)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp1.760.511.060,00 dan terealisasi sebesar Rp1.623.030.966,00 atau 92,19%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis (04.1.01.09)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp360.330.344,00 dan terealisasi sebesar Rp357.689.737,000 atau 99,27%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

***- Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM* (04.1.02.04)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp793.217.390,00 dan terealisasi sebesar Rp781.112.300,00 atau 98,47%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- Sub Kegiatan Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (04.1.02.05)

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp303.420.640,00 dan terealisasi sebesar Rp271.920.270,00 atau 89,62%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

3. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

- Sub Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit (04.1.03.01)

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp333.551.906,00 dan terealisasi sebesar Rp304.465.410,00 atau 91,28%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan (04.1.03.02)

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp539.908.321,00 dan terealisasi sebesar Rp532.440.225,00 atau 98,62%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp523.502.756,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp8.937.469,00 atau 1,71%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- Sub Kegiatan Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan (04.1.03.04)

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp105.110.115,00 dan terealisasi sebesar Rp104.755.224,00 atau 99,66%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan (04.1.03.05)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp324.931.241,00 dan terealisasi sebesar Rp296.443.555,00 atau 91,23%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (04.1.03.06)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp315.750.573,00 dan terealisasi sebesar Rp294.328.973,00 atau 93,22%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan (04.1.03.07)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp370.610.115,00 dan terealisasi sebesar Rp365.405.093,00 atau 98,60%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan (04.1.03.08)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp216.531.241,00 dan terealisasi sebesar Rp206.802.924,00 atau 95,51%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

4. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) (04.1.05.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp366.330.344,00 dan terealisasi sebesar Rp294.606.529,00 atau 80,42%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

V. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (3.27.06.1.01)

- ***Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota (06.01.01.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp54.873.403,00 dan terealisasi sebesar Rp54.362.697,00 atau 99,07%.Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (06.01.01.05)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp338.363.000,00 dan terealisasi sebesar Rp325.564.488,00 atau 96,22%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp527.189.090 maka terjadi penurunan sebesar -Rp201.624.602,00 atau -38,25%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

VI. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (3.27.07.1.02)

- ***Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (07.1.02.01)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp255.687.600,00 dan terealisasi sebesar Rp231.860.216,00 atau 90,68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp525.829.357,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp293.969.141,00 atau -55,91% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (07.1.02.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp312.477.500,00 dan terealisasi sebesar Rp264.607.904,00 atau 84,68%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

2. **Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (3.27.07.1.03)**

- ***Sub Kegiatan Pendampingan dan Pengawalan Koorporasi Petani (07.1.03.05)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp456.871.000,00 dan terealisasi sebesar Rp450.223.459,00 atau 98,54%. Rp161.627.122,00. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani (07.1.03.06)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp395.369.000,00 dan terealisasi sebesar Rp377.553.644,00 atau 95,49%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp539.180.766,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp161.627.122,00 atau -29,98% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Pada Tahun Anggaran 2024 UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak memiliki 2 Program, 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp13.252.792.343,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (3.27.01.1.02)**

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (01.1.02.02)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp146.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp146.400.000,00 atau 100,00% target yang telah ditetapkan telah tercapai dan sesuai dengan perencanaan yang dianggarkan selama tahun 2024.

2. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (3.27.01.1.03)**

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.01)***

Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp6.655.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.626.000,00 atau 99,56% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.02)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp19.102.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.100.000,00 atau 99,99% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (01.1.03.06)***

  Sub kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp61.448.000,00 dan terealisasi sebesar Rp60.790.160,00 atau 98,93% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3.27.01.1.05)

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (01.1.05.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp48.177.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.358.150,00 atau 98,30%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp69.953.120,00, maka terjadi penurunan sebesar -Rp22.594.970,00 atau -32,30% sehingga, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (01.1.05.09)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp27.448.200,00 dan terealisasi sebesar Rp25.802.000,00 atau 94,00%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp31.290.168,00 maka terjadi penurunan anggaran dari tahun lalu -Rp5.488.168,00 atau -17,54. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ***Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.1.06.01)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.988.800,00 dan terealisasi sebesar Rp10.988.500,00 atau 100,00%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp16.461.000,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp5.472.500,00 atau -33,25%. target yang telah ditetapkan telah telah tercapai di tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.1.06.02)***

  Pada tahun 20234 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp206.403.636,00 dan terealisasi sebesar Rp202.162.000,00 atau 97,94%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp173.686.400,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp28.475.600,00 atau 16,39% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (01.1.06.05)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp12.101.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.750.916,00 atau 97,11%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp12.804.560,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp1.053.644,00 atau -8,23% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (01.1.06.09)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp242.668.240,00 dan terealisasi sebesar Rp242.009.440,00 atau 99,73%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp373.120.088,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp131.110.648,00 atau -35,14% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu.. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (01.1.08.01)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp14.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.653.200,00 atau 99,14%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp23.988.500,00,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp9.335.300,00 atau -38,92%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.1.08.02)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp105.499.186,00 dan terealisasi sebesar Rp100.629.620,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp100.629.620,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.855.393,00 atau 4,83% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (01.1.08.04)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.288.196.236,00 dan terealisasi sebesar Rp1.898.854.000,00 atau 88,85%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.898.854.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp134.298.400,00 atau 7,07%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (01.1.09.02)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp180.522.500,00 dan terealisasi sebesar Rp165.849.870,00 atau 91,87%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp7.530.858,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp158.319.012,00 atau 2102,27% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (01.1.09.06)

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp136.897.400,00 dan terealisasi sebesar Rp129.257.400,00 atau 94,42%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp263.549.850,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp134.292.450,00 atau -50,96%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (01.1.09.09)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp6.929.724.620,00 dan terealisasi sebesar Rp6.914.271.253,59 atau 99,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya senilai Rp1.064.987.835,00 maka terjadi kenaikan realiasasi sebesar Rp5.849.283.418,59 atau 549,23%. hal ini dikarenakan penambahan anggaran di tahun 2024 .Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi

- ***Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (02.1.03.03)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp763.560.220,00 dan terealisasi sebesar Rp736.909.578,00 atau 96,51%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp442.652.240,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp294.257.338,00 atau 66,48% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Microorganisme (02.1.03.04)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.134.347.155,00 dan terealisasi sebesar Rp1.119.528.855,00 atau 98,69%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp969.235.884,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp150.292.971,00 atau 15,51% karena anggaran tahun ini lebih besar dari

tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai,. hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pada Tahun Anggaran 2024 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki 2 Program, 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp3.745.978.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (01.1.02.02)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp114.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp114.840.000,00 atau 100,00%. Target yang telah ditetapkan telah tercapai pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.01)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp18.409.500,00 dan terealisasi sebesar Rp17.769.800,00 atau 96,53%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.02)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp10.041.200,00 dan terealisasi sebesar Rp9.760.000,00 atau 97,20%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.06)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp10.897.740,00 dan terealisasi sebesar Rp8.496.614,00 atau 77,97%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (01.1.05.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp61.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.234.000,00 atau 95,39%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (01.1.05.09)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp12.844.500,00 dan terealisasi sebesar Rp73.889.422,00 atau 80,31%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp12.741.899,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp61.147.523,00 atau 479,89% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.1.06.01)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp9.994.250,00 dan terealisasi sebesar Rp9.896.000,00 atau 99,02%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp6.836.100,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.059.900,00 atau 44,76% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.1.06.02)***

  Pada tahun 20234 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp139.539.958,00 dan terealisasi sebesar Rp133.992.830,00 atau 96,02%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu realisasi sebesar Rp95.015.920,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp38.976.910,00 atau 41,02%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (01.1.06.05)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp25.072.270,00 dan terealisasi sebesar Rp18.474.600,00 atau 73,69%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp18.001.950,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp472.650,00 atau 2,63% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (01.1.06.06)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.878.400,00 dan terealisasi sebesar Rp3.520.000,00 atau 90,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp3.840.000,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp320.000,00 atau -8,33%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (01.1.06.09)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp160.776.000,00 dan terealisasi sebesar Rp160.566.842,00 atau 99,87%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp207.429.039,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp46.862.197,00 atau -22,59% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

.

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   - ***Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (01.1.07.02)***

     Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp73.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp67.901.214,00 atau 92,58%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp360.942.000,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp293.040.786,00 atau -81,19% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah

ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (01.1.07.06)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp155.547.020,00 dan terealisasi sebesar Rp144.430.000,00 atau 92,85%. Anggaran ini baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan realisasi pada tahun sebelumnya. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (01.1.08.01)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp16.612.500,00 dan terealisasi sebesar Rp16.592.000,00 atau 99,88%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp4.655.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp11.937.000,00 atau 256,43%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.1.08.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp189.701.500,00 dan terealisasi sebesar Rp167.286.187,00 atau 88,18%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp160.628.768,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.657.419,00 atau 4,14%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (01.1.08.04)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp905.763.756,00 dan terealisasi sebesar Rp764.138.338,00 atau 84,36%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp811.935.520,00 maka terjadi penurunan sebesar -Rp47.797.182,00 atau -5,89%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (01.1.09.02)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.414.000,00dan terealisasi sebesar Rp5.215.500,00 atau 70,35%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp5.054.284,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp161.216,00 atau 3,19%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (01.1.09.06)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp151.807.600,00 dan terealisasi sebesar Rp143.510.574,00 atau 94,53%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp118.550.948,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp24.959.626,00 atau 21,05% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (01.1.09.08)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp48.302.800,00 dan terealisasi sebesar Rp48.302.800,00 atau 100%. Target fisik dan keuangan yang telah ditetapkan telah tercapai pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (01.1.09.09)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini baru dianggarkan sebesar Rp17.938.800,00 dan terealisasi sebesar Rp17.851.600,00 atau 99,51%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran belanja selama tahun 2024.

III. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

- ***Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (04.1.03.03)***

  Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.533.051.255,00 dan terealisasi sebesar Rp1.509.064.715,00 atau 98,44%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.061.860.598,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp447.204.117,00 atau 42,12% karena anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Peralihan aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan keuangan dari semula menggunakan SIPD ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI cukup menghambat kelancaran penatausahaan pada Sub Bagian Keuangan karena aplikasi SIPD RI masih belum sempurna sehingga belum bisa memberikan output maksimal yang diharapkan pengelola keuangan, terutama dalam hal menu administrasi dan pelaporan keuangan, sehingga sebagian output laporan harus dibuat manual.
- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ada perubahan sistem pengelola keuangan pada tingkat SKPD sehingga perlu ada adaptasi bagi para pengelola keuangan dan kegiatan. Salah satu contoh perubahan yang cukup dirasakan bagi pengelola keuangan adalah dalam hal pengajuan Uang Persediaan yang hanya dapat diusulkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Sedangkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD tidak bisa mengajukan Uang Persediaan dan hanya menerima pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran. Dengan sistem ini maka Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan hanya bisa diterbitkan oleh SKPD Induk, sehingga ruang gerak pengelola keuangan pada tingkat UPTD menjadi terbatas dalam mengelola keuangannya.

- Saat proses pertanggungjawaban SPJ keuangan kelengkapan administrasi kegiatan pada masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan masih saja mengalami keterlambatan dan kesalahan-kesalahan setelah diadakan verifikasi SPJ.
- Kurang cermatnya PPTK dan Pelaksana dalam percepatan realisasi tidak sesuai dengan jadwal palang dan Rencana Anggaran Kas yang sudah disusun di awal tahun sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan pengalami pergeseran anggaran kas.
- Dalam proses pengelolaan anggaran dimasing-masing kegiatan juga mengalami keterlambatan karena tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga disetiap pembantu pengelola anggaran harus merangkap beberapa kegiatan untuk menyelesaikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dimasing-masing kegiatan.
- Kekurangan personil teknis karena ada beberapa pegawai yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung kadang dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).
- Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) secara non tunai belum terlaksanan 100% dan masih 50% aja dikarenakan baru diterapkan ke salah satu bendahara pengeluaran pembantu yaitu bendahara pengeluaran pembantu Sekretariat dalam pemakaian KKPD selama tahun 2024.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelengarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD bertindak selaku pengkosolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2024 dan berakhir 31 Desember 2024. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjelasan menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
  Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan berupa pembukuan dan penyajian laporan keuangan (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
  Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- **Definisi**
  Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.
- **Pengakuan**
  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- **Pengukuran**

  Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

  Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- **Definisi**

  Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

  Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

  Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

  - Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
  - Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Definisi**

  Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

  Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

  Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggatan yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila

pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

  Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  2. Pendapatan Transfer
  3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Definisi**

  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

  Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

  Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

  - Beban Pegawai
  - Beban Barang dan Jasa
  - Beban Bungan
  - Beban Subsidi
  - Beban Bantuan Sosial dan Hibah
  - Beban Bantuan Keuangan
  - Beban Penyusutan dan Amortisasi
  - Beban Penyisihan Piutang
  - Beban Lain-Lain
  - Beban Transfer
  - Beban Luar Biasa

4.4.2.5 Aset

- **Definisi**

  Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

  Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

- Aset lancar

  Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

- Aset non lancar

  Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

  Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

  Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya.
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (Frist in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang.
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya.

- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
  a) Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
  b) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu: Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

  Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET
ASET LANCAR
Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya
Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek Lainnya
Piutang Pendapatan
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Uang Muka
Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6 Kewajiban

- Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**
  - **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
    - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
    - Utang Bunga
    - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
    - Pendapatan Diterima Dimuka
    - Utang Beban
    - Utang Jangka Pendek Lainnya
  - **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
    - Utang Dalam Negeri
    - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Definisi**

  Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- **Penyajian**

  Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

  - **EKUITAS**
    - Surplus/Defisit-LO
    - Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjelasan atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2024.

4.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp385.790.000,00 terealisasi sebesar Rp1.016.500.000,00 atau sebesar 263,49%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 hanya menargetkan obyek pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)x100	5	6=((3-5)/5)x100
PENDAPATAN - LRA	**385.790.000**	**1.016.500.000**	**263,49**	**472.945.500,00**	**114,93**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	385.790.000	1.016.500.000	263,49	472.945.500,00	114,93
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	385.790.000	1.016.500.000	263,49	472.945.500,00	114,93

Pendapatan secara total melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pendapatan retribusi daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun penjelasan dari obyek pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1.1 Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah didasarkan:

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dari target sebesar Rp385.790.000,00 terealisasi sebesar Rp1.016.500.000,00 atau sebesar 263,49%. bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp472.945.500,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp543.554.500,00 atau 114,93%. Retribusi daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim pada tahun 2024 berasal dari **Retribusi Jasa Usaha** saja. Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31-Dec-24		(%)	31-Dec-23	% Naik
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	(Turun)
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Retribusi	**385.790.000,00**	**1.016.500.000,00**	**263,49**	**472.945.500,00**	**114,93**
Retribusi Jasa Usaha	**385.790.000,00**	**1.016.500.000,00**	**263,49**	**472.945.500,00**	**114,93**
- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	95.100.000	180.637.000,00	189,94	122.897.000,00	46,98
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	6.800.000,00	16.451.000,00	241,93	10.870.000,00	51,34
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	0,00
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	-	7.600.000,00	100,00	-	100,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	277.890.000	805.812.000,00	289,98	333.178.500,00	141,86

4.1.1.02 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya berupa Sewa Kantin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp 6.000.000,00 atau sebesar100% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2023 terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau 100%. Pada tahun ini Realisasi sama dengan tahun sebelumnya terserap sesuai target sebesar 100%.

4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur target Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga senilai Rp 6.800.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp16.451.000,00 atau sebesar 241,93%. Realiasai Retribusi ini melebihi target dari yang ditetapkan dan semoga di tahun berikutnya bisa mempertahankan realiasasi yang sudah dicapai di tahun 2024.

4.1.02.02.19 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur target Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah senilai Rp95.100.000,00dan Terealisasi sebesar Rp180.637.000,00 atau sebesar 189,94%. Realiasai Retribusi ini melebihi target dari yang ditetapkan dan semoga di tahun berikutnya bisa mempertahankan realiasasi yang sudah dicapai di tahun 2024.

4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur target Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah senilai Rp277.890.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp805.812.000,00 atau sebesar 289,98%. Realiasai Retribusi ini melebihi target dari yang ditetapkan dan semoga di tahun berikutnya bisa mempertahankan realiasasi yang sudah dicapai di tahun 2024.

5.1.1.1. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah. Penjelasan rinci atas Lain-Lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memberlakukan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada rekanan yang tidak dapat menuntaskan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan.

Namun dalam hal administrasi keuangan dari Pemprov. Kaltim (BPKAD), setoran denda ini tidak di entry pada aplikasi SIPD SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim tapi dientry dalam aplikasi SIPD PPKD sebagai Pendapatan Lain-Lain.

Pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Povinsi Kalimantan Timur tidak ada target untuk pos ini, namun selama tahun 2024 ada setoran denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebanyak 5 paket setoran denda, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 2 September 2024 sebesar Rp325.450,00 berupa setoran denda keterlambatan atas Pekerjaan Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudang Pupuk Balikpapan I dengan jumlah hari keterlambatan pekerjaan selama 21 hari kalender atas nama CV. Fadlan Prima.
2. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 2 September 2024 sebesar Rp315.550,00 berupa setoran denda keterlambatan atas Pekerjaan Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudang Pupuk Kubar 2 dengan jumlah hari keterlambatan pekerjaan selama 18 hari kalender atas nama CV. Shannom Jaya Perkasa.
3. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Oktober 2024 sebesar Rp331.112,00 berupa setoran denda keterlambatan atas Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Siranch dengan jumlah keterlambatan pekerjaan selama 4 hari atas nama CV. DEKA.
4. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Desember 2024 sebesar Rp1.091.216,00 berupa setoran denda keterlambatan atas Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Peternakan Biogas (Non Pangan) atas nama PT. Swen Inovasi Transfer.

Pada tahun 2024 ini jumlah total setoran denda atas keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan dari pihak pelaksana pekerjaan dan Pencairan Jaminan Pelaksanaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Povinsi Kalimantan Timur sebanyak **4 paket pekerjaan** dengan total rupiah senilai **Rp2.063.328,00.**

Sedangkan tahun 2023 pendapatan dari denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan dari pihak pelaksana pekerjaan ada 5 paket pekerjaan sebesar **Rp35.856.253,94.** Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pengadaan ternak pada tahun 2023 sedangkan di tahun 2024 untuk paket pekerjaan pengadaan ternak tidak ada keterlambatan pekerjaan.

5.1. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp98.194.276.216,00 terealisasi sebesar Rp91.354.699.611,04 atau sebesar 93,03%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan Bidang Akuntansi BPKAD Prov. Kaltim sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024			31 Desember 2023	
	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023	% 2023
BELANJA DAERAH	**98.194.276.216,00**	**91.354.699.611,04**	**93,03**	**64.596.999.022,00**	**95,26**
BELANJA OPERASI	**87.621.196.976,00**	**80.875.802.733,45**	**92,30**	**59.653.272.615,00**	**95,07**
Belanja Pegawai	26.126.784.165,00	22.711.515.316,00	86,93	16.425.622.319,00	90,38
Belanja Barang dan Jasa	61.494.412.811,00	58.164.287.417,45	94,58	43.227.650.296,00	96,98
JUMLAH BELANJA OPERASI	**87.621.196.976,00**	**80.875.802.733,45**	**92,30**	**59.653.272.615,00**	**95,07**
BELANJA MODAL	**10.573.079.240,00**	**10.478.896.877,59**	**99,11**	**4.943.726.407,00**	**97,58**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.083.422.796,00	3.010.765.399,00	97,64	3.961.983.585,00	97,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.233.162.744,00	7.213.442.478,59	99,73	981.742.822,00	98,33
Belanja Modal Aset Lainnya	256.493.700,00	254.689.000,00	99,30	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	**10.573.079.240,00**	**10.478.896.877,59**	**99,11**	**4.943.726.407,00**	**99,11**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki anggaran terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar Rp87.621.196.976,00. Dari target anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp80.875.802.733,45 atau 92,30%. Bila dibandingkan dengan Realisasi tahun sebelumnya pada tahun 2023 senilai Rp59.653.272.615,00 atau 95,07 maka terdapat kenaikan realiasasi dari segini nilai sebesar Rp21.222.530.118,45 atau 35,58%. Hal ini dikarenakan kenaikan anggaran tahun 2024 meningkat. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31-Dec-24		(%)	31-Dec-23	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Operasi	**87.621.196.976,00**	**80.875.802.733,45**	**92,30**	**59.653.272.615,00**	35,58
Belanja Pegawai	26.126.784.165	22.711.515.316,00	**86,93**	16.425.622.319,00	38,27
Belanja Barang dan Jasa	61.494.412.811	58.164.287.417,45	**94,58**	43.227.650.296,00	34,55

5.1.2.1.1.1 Belanja Pegawai

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengganggarkan belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp26.126.784.165,00 untuk memberikan Kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS, PPPK dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp22.711.515.316,00 atau sebesar 86,93%. Kenaikan Persentase Belanja Pegawai tersebut dikarenakan adanya kenaikan gaji PNS dan penambahan tunjangan fungsional PPPK di tahun 2024.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31-Dec-24		(%)	31-Dec-23	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pegawai	**26.126.784.165**	**22.711.515.316**	**86,93**	**16.425.622.319**	38,27
Belanja Gaji & Tunjangan ASN	8.584.148.136	7.682.184.316,00	**89,49**	6.177.517.819	24,36
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	16.566.796.029	14.095.851.000,00	**85,08**	9.401.565.000	49,93
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	975.840.000	933.480.000,00	**95,66**	846.539.500	10,27

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp3.415.268.849,00 atau sebesar 13,07% disebabkan oleh adanya beberapa ASN yang memasuki purna tugas yaitu sebanyak 4 orang yang terdiri dari pejabat eselon IV 1 orang dan 3 orang non eselon 3 orang, serta uang makan pegawai yang tidak bisa terealisasi secara penuh karena faktor ketidakhadiran (dinas, cuti, sakit, izin, dan lain lain).

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan dinas dengan total anggaran sebesar Rp61.494.412.811,00 dan sampai akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp58.164.287.417,45 atau 94,58% dibandingkan tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp3.330.125.393,55 atau 7,70%. Hal ini dikarenakan penambahan anggaran di tahun 2024.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31-Dec-24		(%)	31-Dec-23	% Naik
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	(Turun)
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Barang dan Jasa	**61.494.412.811,00**	**58.164.287.417,45**	**94,58**	**43.227.650.296,00**	**34,55**
Belanja Barang	37.116.527.485	35.573.419.664,00	**95,84**	19.422.109.051,00	**83,16**
Belanja Jasa	13.186.655.502	11.432.967.360,45	**86,70**	10.236.973.881,00	**11,68**
Belanja Pemeliharaan	1.231.268.498	1.214.240.220,00	**98,62**	1.698.743.203,00	**(28,52)**
Belanja Pejalanan Dinas	9.871.461.326	9.855.160.173,00	**99,83**	11.522.669.862,00	**(14,47)**
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.500.000	88.500.000,00	**100,00**	347.154.299,00	**(74,51)**

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp3.330.125.393,55 atau sebesar 5,42% disebabkan antara lain oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran belanja barang dan jasa terhadap pengadaan barang dan jasa tahun 2024 serta Pengembalian Belanja LS/TU/GU selama pelaksanaan tahun 2024.

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp10.573.079.240,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp10.478.896.877,59 atau sebesar 99,11%.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31-Dec-24		(%)	31-Dec-23	% Naik
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	(Turun)
1	**2**	**3**	**4=(3/2)**	**5**	**6=((3-5)/5)**
Belanja Modal	**10.573.079.240,00**	**10.478.896.877,59**	**99,11**	**4.943.726.407,00**	**111,96**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.083.422.796	3.010.765.399,00	97,64	3.961.983.585,00	(24,01)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.233.162.744	7.213.442.478,59	99,73	981.742.822,00	634,76
Belanja Modal Aset Lainnya	256.493.700	254.689.000	99,30	-	99,30

Belanja modal sebesar Rp10.478.896.877,59 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 3.010.765.399,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 7.213.442.478,59
- Belanja Modal Aset Lainnya Rp 254.689.000,00

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp 94.182.362,41 atau sebesar 0,89% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dari pengadaan belanja modal, terutama pengadaan yang melalui proses lelang/tender, ekatalog dan pencatatan (Non Tender). Penawaran yang diajukan pemenang lelang nilainya di bawah pagu anggaran yang tersedia.

5.1.2.3 Jaminan Pemeliharaan

Jaminan pemeliharaan merupakan suatu kelompok dokumen yang diterbitkan oleh pihak bank atau pihak asuransi. Documen ini berperan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pemeliharaan terhadap suatu pekerjaan yang diselesaikan. Jadi selesai pelaksanaan pekerjaan berakhir atau tuntas, pihak berwenang akan melakukan pemeliharaan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jaminan pemeliharaan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode dari tugas pekerjaan fisik selesai. Jika dalam waktu itu ditemukan kerusakan di bangunan yang telah diselesaikan, maka jaminan itu dapat digunakan pihak perusahaan yang mendapatkan jaminannya. Sementara itu besaran jaminan yang diberikan yaitu 5 % dari nilai kontrak yang sudah dibuat. Maka apa saja yang terjadi nantinya, jaminan pemeliharaan dalam bentuk perjanjian kontrak dapat menjadi referensi khusus.

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP No.4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V.C halaman 22 baris 12-13 menyatakan bahwa “Jaminan Pemeliharaan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.

Selama Tahun Anggaran 2024 ada 35 paket pekerjaan konstruksi yang memiliki jaminan pemeliharaan, baik dari belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Ada 35 paket pekerjaan konstruksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim dengan total nilai jaminan Rp 229.351.215,00 Daftar jaminan pemeliharaan selengkapnya ada pada lampiran XXVI laporan keuangan ini.

5.1.2. Pendapatan LO

Pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp1.016.500.000,00 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2023 sebesar Rp472.945.500,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 543.554.500,00 atau 114,93%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31-Dec-24	Realisasi 31-Dec-23	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	**1.016.500.000**	**472.945.500**	**114,93**
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	**1.016.500.000**	**472.945.500**	**114,93**
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.016.500.000	472.945.500	**114,93**

5.1.2.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp 1.016.500.000,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp 472.945.500,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp 543.554.500,00 atau 114,93%. Rincian pendapatan retribusi daerah - LO tahun 2023 komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31-Dec-24	Realisasi 31-Dec-23	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Retribusi Daerah	**1.016.500.000,00**	**472.945.500,00**	**114,93**
Retribusi Jasa Usaha	**1.016.500.000,00**	**472.945.500,00**	**114,93**
-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	-	339.178.500,00	100,00
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	7.600.000,00	-	100,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00	10.870.000,00	(100,00)
- 'Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	0,00	122.897.000,00	(100,00)
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	6.000.000,00	0,00	100,00
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	16.451.000,00	0,00	100,00
- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	180.637.000,00	0,00	100,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	805.812.000,00	0,00	100,00

Kenaikan pos Pendapatan Retribusi Daerah ini karena :

- Banyaknya permintaan dari masyarakat untuk membeli produk jasa usaha dari UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan adanya peremajaan ternak non bibit, dimana ternak yang sudah tidak produktif diafkir dengan cara dijual. Realisasi

dari pos ini memang sangat tergantung kepada permintaan dari masyarakat dalam hal membeli ternak, pupuk kandang dan bibit HMT

- Tingginya minat masyarakat yang memeriksakan hewan kesayangannya pada layanan kesehatan hewan di Klinik Hewan Samarinda.
- Tingginya permintaan dari beberapa perusahaan dan masyarakat dalam hal pengujian sampel dan jenis jasa pelayanan lainnya pada UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet.

5.1.2.2. Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Lain-lain PAD Yang Sah-LO pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2024 tidak ada Lain – Lain PAD yang Sah-LO baik untuk dinas induk maupun di UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak serta UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

1.1.1. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2024 sebesar Rp 80.082.740.846,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp62.074.315.523,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp18.008.425.323,00 atau 29,01%. Rincian Beban LO tahun 2024 komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Beban LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31-Dec-24	Realisasi 31-Dec-23	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Beban - LO	**80.082.740.846,00**	**62.074.315.523,00**	**29,01**
Beban Operasi	**80.054.932.605,00**	**59.746.624.768,00**	**33,99**
- Beban Pegawai - LO	22.711.515.316,00	16.425.622.319,00	38,27
- Beban Barang	34.752.168.784,00	19.516.976.290,00	78,06
- Beban Jasa	11.433.348.112,00	10.235.458.795,00	11,70
- Beban Pemeliharaan	1.214.240.220,00	1.698.743.203,00	(28,52)
- Beban Perjalanan Dinas	9.855.160.173,00	11.522.669.862,00	(14,47)
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.500.000,00	347.154.299,00	(74,51)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**27.808.241,00**	**2.327.690.755,00**	**(98,81)**
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.808.241,00	2.327.690.755,00	(98,81)

1.1.1.1. Beban Operasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menanggung beban operasi sebesar Rp 80.054.932.605,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp59.746.624.768,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp20.308.307.837,45 atau 29,01%. Rincian Beban Operasi tahun 20224 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1.1.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp22.711.515.316,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp16.425.622.319,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 6.285.892.997,00 atau sebesar 38,27%. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan gaji PNS dan penambahan tunjangan fungsional PPPK di tahun 2024.

1.1.1.1.2. Beban Barang

Beban Barang adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian barang dimana pada tahun 2024 beban barang sebelumnya adalah akun beban persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan menjadi Beban Barang pada tahun 2024 di Aplikasi SIPD sebesar Rp 4.752.168.784,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp19.516.976.290,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 1615.235.192.494,00 atau sebesar 78,06%. Kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja barang pada tahun 2024.

1.1.1.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila Beban Jasa tahun 2024 sebesar Rp11.433.348.112,45 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp10.235.458.795,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.197.889.317,45 atau sebesar 11,70%. Kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja jasa pada tahun 2024.

1.1.1.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban pemeliharaan tahun 2024 sebesar

Rp1.214.240.220,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.698.743.203,00 maka terjadi penurunan sebesar (Rp484.502.983,00) atau sebesar (28,52%). Penurunan ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran belanja pemeliharaan pada tahun 2024.

1.1.1.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau non pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2024 sebesar Rp9.855.160.173,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp11.522.669.862,00 maka terjadi penurunan sebesar (Rp1.667.509.689,00) atau sebesar (14,47%), hal ini disebabkan karena anggaran untuk pos perjalanan dinas tahun 2024 lebih kecil dibanding tahun 2023, sehingga nilai belanja perjalanan dinas yang menjadi beban perjalanan dinas mengalami penurunan sesuai dengan realisasi kegiatan fisik yang mendukung pada tahun 2024.

1.1.1.1.6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemberian hibah oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas. Beban hibah tahun 2024 teralokasi anggaran sebesar Rp88.500.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp347.154.299,00 maka terdapat penurunan realisasi anggaran sebesar (Rp258.654.299,00)atau (74,51%). Hal ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran di beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat di tahun 2024.

1.1.1.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Adapun beban Amortisasi selama tahun 2024 Rp27.808.241,00 bila digandingkan dengan amortisasi pada tahun 2023 sebesar Rp10.567.200,00 yang merupakan penyusutan amortisasi dari Belanja modal Aset Tidak Berwujud berupa software dan Kajian.

Maka terdapat kenaikan sebesar Rp17.241.041 atau 163,16%. Kenaikan realisasi ini dikarenakan adanya Amortisasi dari Aset tidak berwujud berupa software senilai Rp21.151.975,00 dan Amortisasi Aset tidak berwujud berupa Kajian senilai Rp6.656.266,67.

1.1.2. Aset

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 memiliki aset sebesar Rp 46.801.808.684,00. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu sebesar Rp 36.147.368.568,61 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp10.654.440.116,00 atau 29,48%. Rincian aset tahun 2024 beserta komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Aset Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
ASET	**46.801.808.684,53**	**36.147.368.568,61**	**29,48**
Aset Lancar	1.753.322.350,00	932.071.470,00	88,11
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	-	-
- Persediaan	1.753.322.350,00	932.071.470,00	88,11
			-
Aset Non Lancar	45.048.486.334,53	35.215.297.098,61	27,92
- Investasi Jangka Panjang	-	-	-
- Aset Tetap	44.441.602.876,20	34.835.294.398,61	27,58
- Aset Lainnya	606.883.458,33	380.002.700,00	59,71

1.1.2.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp1.753.322.350,00. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp932.071.470,00 maka dapat diketahui terdapat Kenaikan sebesar Rp821.250.880,00 atau 88,11% Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

1.1.2.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim tidak memiliki rekenening bank karena setiap pendapatan yang diterima langsung disetorkan ke kas daerah dan per 31 Desember 2024 tidak memiliki saldo kas.

1.1.2.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2024, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran secara manual dan secara sistem SIPD juga saldo kas di Bendahara Pengeluaran saldo NIHIL dengan bukti STS manual STS GU/UP NIHIL sudah disetorkan ke Kasda pada tanggal 30 Desember 2024 (bukti STS terlampir). Sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/16598-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Awal Tahun Anggaran 2025 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, bendahara pengeluaran harus sudah menyetorkan sisa uangnya paling lambat tanggal 30 Desember 2024. Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan dan Keswan telah menyetorkan sisa Uang Persediaan (UP) pada tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp53.373.818,00.

1.1.2.1.3. Piutang

Pada Neraca gabungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim per 31 Desember 2024 tidak terdapat Piutang, tapi pada tampilan Neraca masing-masing per sub unit Dinas dan UPTD terlihat tidak adanya piutang.

1.1.2.1.4. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.753.322.350,00. Bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp932.071.470,00 maka dapat diketahui terdapat Kenaikan sebesar Rp821.250.880,00 atau 88,11% sesuai Berita Acara Stock Opname persediaan per 31 Desember 2024. Rincian Persediaan masing-masing terdiri sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	**Dinas Peternakan dan Keswan**	**3.780.000,00**
	Rincian Stockopname DPKH :	
	1.1.7.01.03.01.001 - Alat Tulis	150.000,00
	1.1.7.01.03.02.006 - Kertas dan Cover Lainnya	3.310.000,00
	1.1.7.01.03.03.007 - Bahan Cetak Lainnya	320.000,00
2	**UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**1.739.397.850,00**
	Rincian Stockopname UPTD PTHPT :	

	1.1.7.01.01.11.001 – Bahan / Bibit Ternak	1.622.847.850
	1.1.7.01.04.02.001 – Obat Obatan Lainnya	116.550.000
3	**UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet**	**Rp 10.144.500,00**
	Rincian Stockopname UPTD LKK :	
	1.1.7.01.03.01.001 – Alat Tulis	5.044.500,00
	1.1.7.01.03.04.003 – Benda Pos Lainnya	650.000,00
	1.1.7.01.03.08.012 – Alat Listrik Lainnya	4.450.000,00

1.1.2.1.5. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp44.441.602.876,20. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp34.835.294.398,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp9.606.308.478,00 atau 27,58%. Nilai aset tetap ini telah direkonsiliasi dengan melibatkan Bidang Aset BPKAD (berita acara rekonsiliasi aset terlampir). Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 15. Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2024

Uraian	2024	Bertambah	Berkurang	2023	% Naik (turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6=((5-2)/2)
ASET TETAP	**44.441.602.876,20**	**13.000.000,00**	**630.899.400,00**	**43.823.703.476,20**	**(1,39)**
- Tanah	2.670.241.600,00			2.670.241.600,00	-
- Peralatan dan Mesin	37.391.612.333,66	13.000.000,00	12.666.400,00	34.380.513.334,66	(8,05)
- Gedung dan Bangunan	36.489.762.725,20		618.233.000,00	29.894.553.246,61	(18,07)
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.240.892.050,00			1.240.892.050,00	-
- Aset Tetap Lainnya	3.723.356.053,00			3.723.356.053,00	-
- Kontruksi Dalam Pengerjaan	94.183.500,00			94.183.500,00	-
- Akumulasi Penyusutan	-37.168.445.385,66	-	-	-37.168.445.385,66	-

1.1.2.1.5.1. Tanah

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 memiliki tanah senilai Rp2.670.241.600,00 nilai ini sama dengan tahun 2023.

1.1.2.1.5.2. Peralatan dan Mesin

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 memiliki peralatan dan mesin senilai Rp37.391.612.733,66. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun 2023 yaitu sebesar Rp34.380.513.334,66 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp3.011.098.999,00 atau 8,76%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

Belanja Modal	: Rp3.083.422.796,00
Hibah	: -
Reklasifikasi	: Rp13.000.000,00 (Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke BM Peralatan dan Mesin UPTD PTHPT)
Revaluasi	: -

Pengurangan

Rusak Berat	: -
Dihapuskan	: -
Reklasifikasi	: -
Nilai dibawah Kapitalisasi	: -
BM tidak jadi Aset Tetap	:Rp. 12.666.400,00 (BM Peralatan dan Mesin tidak menjadi Aset Tetap – Persediaan DPKH)

Rincian pengurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pada kertas kerja Rekon Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 sebagaimana lampiran XXIII laporan keuangan ini.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 ke atas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp1.500.000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable).

1.1.2.1.5.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp36.489.762.725,20. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar

Rp29.894.553.246,61 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp6.595.209.479,00 atau 22,06%. Perubahan nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan
- Belanja Modal : -
- Hibah : -
- Reklasifikasi : -
- Revaluasi : -

Pengurangan
- Rusak Berat : -
- Dihapuskan : Rp 605.233.000,00
- Reklasifikasi : Rp 13.000.000,00
- Nilai dibawah Kapitalisasi: -
- BM tidak jadi Aset Tetap : -

Rincian pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat pada kertas kerja Rekon Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 sebagaimana lampiran XXII laporan keuangan ini.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp20.000.000,00 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp50.000.000,00 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp20.000.000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2024 nilai gedung dan bangunan yang termasuk dalam ekstracountable Nihil, sama dengan tahun 2023.

1.1.2.1.5.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.240.892.050,00. Nilai ini sama dengan nilai asset tahun 2023.

1.1.2.1.5.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.723.356.053,00 Bila dibandingkan dengan asset tahun lalu sebesar Rp3.723.356.053,00 maka tidak ada

perbandingan dikarenakan tidak ada penambahan / pengurangan asset tetap lainnya di Tahun 2024.

1.1.2.1.5.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 memiliki aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp94.183.500,00 hal ini dikarenakan proses pembangunan belum selesai dan baru akan dibangun di tahun 2025. Nilai ini diperoleh dari Rincian Rekonsiliasi Aset Tetap Belanja Modal di Simda Keuangan dan Simda BMD.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada kertas lerka Rekon Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 sebagaimana lampiran XXIII laporan keuangan ini.

1.1.2.1.5.7. Akumulasi Penyusutan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. ***Akumulasi Penyusutan masih belum bisa disajikan karena masih melakukan proses perhitungan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun.***

1.1.2.1.6. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp606.883.458,33 Bila dibandingkan dengan asset tahun lalu sebesar Rp380.002.700,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp226.880.758,00 atau 59,71%.

Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

1.1.2.1.6.1. Aset Tidak Berwujud

Pada Neraca Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 terlihat adanya Aset Tidak Berwujud sebesar Rp349.325.000,00 bila dibandingkan tahun lalu senilai Rp 94.636.000,00 Aset Tidak Berwujud ini terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Sofware) senilai Rp 249.481.000,00 dan Aset Tidak Berwujud (Kajian) Rp99.844.000,00.

1.1.2.1.6.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- **Aset Rusak Berat/Aset Yang Akan Dilelang**

Pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur **TIDAK MEMILIKI** aset tetap rusak berat dan yang akan dilelang. NIlai Aset Rusak berat/Aset yang akan dilelang Rp338.614.500,00. Nilai ini sama dengan tahun 2023. Aset Lain-lain yang rusak berat ini dalam Neraca SIMDA BMD tidak terlihat nilainya, namun databasenya ada di Bidang Aset BPKAD Prov. Kaltim.

1.1.3. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Pada akhir tahun 2024 terdapat kewajiban sebesar Rp1.676.626,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp1.295.874,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp380.752,00 atau 29,38%. Penjelasan atas kenaikan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1.3.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.676.626,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp1.295.874,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp380.752,00 atau 29,38%. Kewajiban Jangka Pendek ini berasal dari Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Air pada bulan Desember 2024 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet.

1.1.3.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun Anggaran 2024.

1.1.3.3. Utang Belanja

Utang belanja merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2024 terdapat Utang beban sebesar Rp1.676.626,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp1.295.874,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp380.752,00 atau 29,38%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh

kenaikan utang belanja berupa tagihah jasa air (PDAM) di bulan Desember 2024 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp1.316.440,00 dan pada UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet senilai Rp360.186,00.

1.1.4. Ekuitas

Kekayaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.800.132.058,53 dan ini menjadi Ekuitas awal tahun 2024. Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2024 terdapat ekuitas sebesar Rp46.800.132.058,53. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp36.146.072.694,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp10.654.059.364,00 atau 29,48%.

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pos pendapatan dan belanja telah dilaksanakan rekonsiliasi setiap bulan dengan entitas pelaporan berdasar basis kas.

Rekonsiliasi Belanja per 31 Desember 2024 telah dilaksanakan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Bidang Akuntansi pada tanggal 8 s/d 9 Januari 2024 di Hotel Aston Samarinda.

Rekonsiliasi Pendapatan per 31 Desember 2024 telah dilaksanakan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Bidang Akuntansi pada tanggal 8 s/d 9 Januari 2024 di Hotel Aston Samarinda.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Bhayangkara No.54 Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis Kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 UPTD sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD tersebut beralamat sebagai berikut:

- **UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

  UPTD Laboratorium tipe B dengan wilayah/cakupan kerja meliputi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Samarinda

- **UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**

  UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi Pembibitan Ternak dan HMT serta Peningkatan Mutu Genetik dan Produksi Ternak beralamat di Jl. Negara Desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antar personil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasinal layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing Dinas dan UPTD dijabarkan sebagai berikut:

- **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur**

Tugas yang mejadi tanggungjawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tersebut, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis bidang peternakan ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Tugas yang mejadi tanggungjawab UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan tugas pemantauan yang bersifat menunjang kegiatan Sub Dinas Kesehatan Hewan dan Dinas Peternakan pada umumnya.

Dalam melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi:

- Menyelenggarakan kegiatan surveillans pemeriksaan penyakit hewan baik kejadian wabah atau insidentil yang disebabkan oleh penyakit infeksius, termasuk penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia atau zoonosis.
- Menyelenggarakan kegiatan surveillans, pemeriksaan penyakit dan infeksius atau penyakit menular baik bersifat wabah atau insidentil seperti intoksikasi, gangguan metabolisme termasuk penyakit akibat kandungan residucoas atau yang berpengaruh pada konsumen.
- Menyelenggarakan kegiatan pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius.
- Melaksanakan urusan ketatausahaan.

➢ **UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**

Tugas yang mejadi tanggungjawab UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak adalah Meningkatkan Mutu Genetik dan Produksi Ternak.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Menyediakan bibit ternak dan hijauan pakan ternak bermutu secara kontinyu untuk memenuhi kebutuhan bibit ternak di Kalimantan Timur.
- Menyediakan semen cair/beku secara cepat, tepat waktu dan jumlah sesuai kebutuhan.
- Meningkatkan kemampuan daerah dan mengurangi ketergantungan ternak potong atau ternak bibit dari luar Kalimantan Timur.
- Pengembangan agrowisata sebagai salah satu tujuan kunjungan wisata di Kalimantan Timur.
- Sebagai Pusat Kajian Teknologi Peternakan, Tempat Pelatihan, Magang, Penelitian dan Sekolah Lapang bagi Peternak/Kelompok Tani Ternak dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pembibitan ternak, hijauan pakan ternak (HPT).
- Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.* Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 16. Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2024

Jabatan	Pendidikan								Jumlah
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA	SMP	SD	
Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
Kepala Bidang / Kepala UPTD	1	4	2	-	-	-	-	-	**7**
Kepala Sub Bagian /Kepala Seksi / Subkor	-	10	6	-	1	-	-	-	**17**
Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	8	-	3	-	-	-	**11**
Pelaksana	-	-	11	-	-	30	-	-	**41**
PPPK	-	2	25	1	2	-	-	-	**30**
Non ASN	-	-	39	3	4	42	2	2	**93**
JUMLAH	**1**	**17**	**91**	**4**	**9**	**72**	**2**	**2**	**200**

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Allah سبحانه وتعالى meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 22 Januari 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2024
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2024 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2024
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2024
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2024
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2024
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud
Lampiran IX	Rekap tagihan Belanja tahun 2024 yang ditagih / dibayar tahun 2025
Lampiran X	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2024
Lampiran XI	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 Desember 2024 dengan tanggal cetak diatas 31 Desember 2024
Lampiran XII	Berita Acara Penutupan Kas akhir tahun 2024
Lampiran XIII	Register Penutupan Kas akhir tahun 2024
Lampiran XIV	Rekap Utang Tahun 2024
Lampiran XV	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2024 yang jadi Persediaan
Lampiran XVI	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 Desember 2024
Lampiran XVII	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 Desember 2024 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XVIII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 Desember 2024 sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XIX	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
Lampiran XX	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
Lampiran XXI	Fotocopy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Tahun 2024 (Jilid Terpisah)
Lampiran XXII	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 Desember 2024 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXIII	Kertas Kerja Rekon Aset Tetap
Lampiran XXIV	Analisa Perhitungan Vertikal dan Horisontal
Lampiran XXV	Kertas Kerja Perhitungan ATB
Lampiran XXVI	Daftar Rekap Jaminan Pemeliharaan Tahun 2024